



# **LAPORAN KINERJA (LKjIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2020**



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGETAN**

Jalan Imam Bonjol No. 4 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon. (0351) 895365–892528 Fax.(0351) 895365



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2020. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dimasa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua pihak.

Magetan, Februari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGETAN**  
**dr. HARI WIDODO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680725 200212 1 002



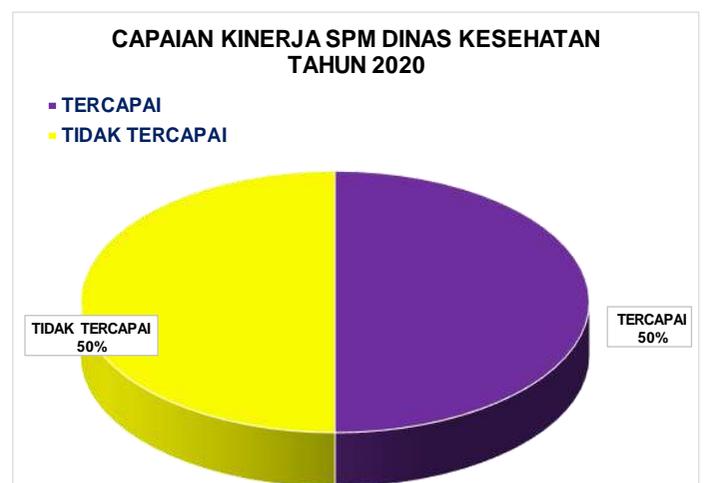
# IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Guna mencapai kondisi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2020 yang meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan diantaranya : Persentase Keluarga Sehat sebesar 100%, Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan sebesar 100%, selain itu pencapaian Indikator Prioritas Dinas Kesehatan diantaranya Prevalensi Stunting sebesar 100% yang sudah tercapai, Tercapainya Angka Kematian Ibu sebesar 100 %, Tercapainya Angka Kematian Bayi sebesar 100%.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam periode tahun 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis. Dokumen tersebut juga berisi tentang indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2020, selain itu juga program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator tersebut sudah mencapai target sebesar 100%. Sedangkan dari 12 (dua belas) indikator SPM Bidang Kesehatan sebanyak 6 (enam) indikator atau 50% dikategorikan tercapai target, sedangkan 6 (enam) indikator atau 50% tidak tercapai target. Hasil tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap indikator-indikator yang tidak tercapai target pada tahun berikutnya.

Alokasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 226.235.636.446,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 179.482.051.511 atau serapan dana APBD mencapai 79,33 %. Kontribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras dari bidang kesehatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Upaya dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khususnya bidang kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan lintas sektor terkait dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Magetan.

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. <b>GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN</b>	1
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	1
2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan .....	3
3. Asset / Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan .....	9
B. <b>ISU STRATEGIS</b> .....	12
 <b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. <b>RENCANA STRATEGIS</b> .....	15
B. <b>PERJANJIAN KINERJA</b> .....	19
 <b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. <b>CAPAIAN KINERJA</b> .....	21
1. Pengukuran Kinerja .....	21
2. Analisa Capaian Kinerja .....	25
B. <b>REALISASI ANGGARAN</b> .....	59
 <b>BAB IV    PENUTUP</b>	76
<b>LAMPIRAN</b>	
1. <b>MATRIKS RENSTRA</b>	
2. <b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020</b>	
3. <b>PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020</b>	



## **A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN**

### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bahwa Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang kesehatan diantaranya upaya kesehatan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 3) pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan serta Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat Kabupaten;
- 4) penerbitan rekomendasi/izin Rumah Sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
- 5) penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;

- 6) penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- 7) penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 8) penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu);
- 9) penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- 10) pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- 11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 12) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
4. Bidang Kesehatan Masyarakat
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
  - a. Seksi Kefarmasian
  - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  - c. Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat
  - b. Instalasi Farmasi Kabupaten
  - c. Laboratorium Kesehatan Daerah
  - d. RSUD dr. Sayidiman
8. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Dokter;
  - b. Dokter Gigi;
  - c. Bidan;
  - d. Perawat;
  - e. Sanitarian;
  - f. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
  - g. Administrasi Kesehatan
  - h. Asisten Apoteker;
  - i. Pranata Laboratorium;
  - j. Nutrisionis.

## 2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Dukungan sumber daya pada Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya pada Dinas Kesehatan meliputi tenaga teknis dan tenaga administrasi pendukung. Sebagai organisasi pemerintah Dinas Kesehatan memiliki tugas menjalankan pembangunan di bidang kesehatan dan untuk mendukung tugas tersebut dibutuhkan sumber daya yang handal dan profesional.

Jumlah tenaga di lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan pada Tahun 2020 adalah sebanyak 1.470 orang dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Komposisi tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Instansi</b>	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>	<b>Jabatan Pelaksana</b>	<b>Pejabat Struktural</b>
1	Dinas Kesehatan	13	51	15
2	Puskesmas, Labkesda, IFK	811	177	16
3.	RSUD dr.Sayidiman	302	73	12
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1126</b>	<b>301</b>	<b>43</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman Tahun 2020*

Secara operasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia sebanyak 1.470 (Seribu Empat Ratus Tujuh Puluh Orang) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jenjang pendidikan tertinggi S2 dan terendah SD. . Secara rinci data Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan, golongan dan jurusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2020**

No.	Uraian	Pendidikan										Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D2	D3	D4	S1	S2	
	PNS :											
1.	Non Fungsional	4	6	145	5	0	0	39	2	57	7	265
2.	Fungsional	0	0	20	10	0	0	873	41	236	25	1205
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>165</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>43</b>	<b>293</b>	<b>32</b>	<b>1.470</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020*

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan**  
**berdasarkan Golongan pada Tahun 2020**

No.	Uraian	Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jumlah
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
	PNS :																		
1.	Non Fungsional	0	0	2	0	7	14	28	16	25	99	26	34	9	2	0	0	0	262
2.	Fungsional	0	0	1	0	0	16	270	72	224	200	134	205	58	19	2	4	3	1.208
<b>JUMLAH</b>																			<b>1.470</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020*

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan**  
**Berdasarkan jurusan pendidikan pada Tahun 2020**

No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana/S2	Manajemen Kesehatan	7
2.	Pasca Sarjana/S2	Kesehatan Masyarakat	1
3.	Pasca Sarjana/S2	Magister Public Health	2
4.	Pasca Sarjana/S2	Magister Sains	1
5.	Pasca Sarjana/S2	Spesialis	20
6.	Pasca Sarjana/S2	Farmasi	1
7.	Pasca Sarjana/S2	Manajemen Administrasi RS	1
8.	Sarjana/S1	Kedokteran Umum	59
9.	Sarjana/S1	Apoteker	28
10.	Sarjana/S1	Ekonomi	12
11.	Sarjana/S1	Administrasi	5
12.	Sarjana/S1	Gizi	4
13.	Sarjana/S1	Hukum	2
14.	Sarjana/S1	Kedokteran Gigi	27
15.	Sarjana/S1	Keperawatan	103
16.	Sarjana/S1	Kesehatan Masyarakat	52
17.	Sarjana/S1	Sosial Politik	13
18.	Sarjana/S1	Teknik Lingkungan	8
19.	Sarjana/S1	Psikologi	1

No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah
20.	Sarjana/S1	Teknik Sipil	1
21.	Diploma/D IV	Kebidanan	43
22.	Diploma/D IV	Analisis Kesehatan	3
23.	Diploma/D IV	Radiografer	1
24.	Diploma/D3	Akademi Analisis Kesehatan	41
25.	Diploma/D3	Gizi	44
26.	Diploma/D3	Kebidanan	324
27.	Diploma/D3	Kesling	36
28.	Diploma/D3	Perawat	317
29.	Diploma/D3	Perawat Gigi	20
30.	Diploma/D3	Farmasi dan Makanan	15
31.	Diploma/D3	Farmasi	37
32.	Diploma/D3	Informatika	2
33.	Diploma/D3	Perekam Medis	30
34.	Diploma/D3	Refraksi Optisi	2
35.	Diploma/D3	Teknik Komputer	3
36.	Diploma/D3	Elektromedik	4
37.	Diploma/D3	Anastesi	3
38.	Diploma/D3	Manajemen	8
39.	Diploma/D3	Radiografer	4
40.	Diploma/D3	Fisioterapi	3
41.	Diploma	Kesehatan Kimia Analisis	1
42.	Diploma/D1	Kebidanan	6
43.	Diploma/D1	Keperawatan	0
44.	Diploma/D1	Kesehatan Lingkungan	6

No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah
45.	Diploma/D1	SPPH	3
46.	SLTA	KPPA	2
47.	SLTA	SMF	7
48.	SLTA	Pekarya Kesehatan	27
49.	SLTA	SMAK	3
	SLTA	SMK	30
50.	SLTA	SPAG	2
51.	SLTA	SPK	8
52.	SLTA	SPRG	9
53.	SLTA	Umum	48
54.	SLTA	SMEA	18
55.	SLTA	STM	2
56.	SLTP		6
57.	SD/MI		4
<b>J U M L A H</b>			<b>1.470</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020

RSUD dr. Sayidiman didukung sumber daya manusia sebanyak 802 (Delapan Ratus Dua Orang) orang terdiri dari PNS sebanyak 394 orang, BLUD tetap sebanyak 208 orang, BLUD Kontrak tetap sebanyak 196 orang, Dokter tamu sebanyak 4 orang. Secara rinci tenaga kesehatan di RSUD dr.Sayidiman bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan**

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	PNS
2.	Dokter Spesialis Bedah	2	PNS

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN
3.	Dokter Spesialis Obgyn	2	PNS
4.	Dokter Spesialis Mata	1	BLUD Tetap
5.	Dokter Spesialis Anak	3	2 PNS, 1 BLUD tetap
6.	Dokter Spesialis Saraf	2	PNS
7.	Dokter Spesialis Radiologi	2	PNS
8.	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	1	PNS
9.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	PNS
10.	Dokter Spesialis Anestesi	2	PNS
11.	Dokter Spesialis Paru	2	Dokter Tamu
12.	Dokter Spesialis Jantung	1	PNS
13.	Dokter Spesialis Orthopedi	1	PNS
14.	Dokter Spesialis THT	1	Dokter Tamu
15.	Dokter Umum	23	14 PNS, 4 BLUD Tetap, 5 BLUD Kontrak
16.	Dokter Gigi	3	PNS
17.	Dokter Konservasi HD	1	Dokter Tamu
18.	Perawat	291	163 PNS, 61 BLUD Tetap, 67 BLUD Kontrak
19.	Perawat Anastesi	3	3 PNS
21.	Perawat Gigi	3	PNS
22.	Bidan	72	22 PNS, 28 BLUD Tetap, 23 BLUD Kontrak
23.	Tenaga Paramedis Non Perawatan	106	74 PNS, 18 BLUD Tetap, 14 BLUD Kontrak
24.	Tenaga Administrasi	275	85 PNS, 95 BLUD Tetap, 95 BLUD Kontrak
	Jumlah	802	

Sumber : RSUD dr. Sayidiman Magetan

### 3. Asset/Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan merupakan pusat pemerintahan yang tugas pokoknya sebagai tempat koordinasi pembangunan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas dan kuantitas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, cepat, dan tepat serta mampu meningkatkan motivasi kerja sumberdaya aparatur.

Sedangkan sarana kesehatan dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan**  
**pada Tahun 2020**

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	22
2.	Puskesmas Pembantu	59
3.	Ponkesdes	107
4.	Posyandu Balita	935
5.	Posyandu Lansia	475

*Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020*

Penyediaan sarana kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Posyandu Balita dan Posyandu Lansia diharapkan dapat menjangkau masyarakat termasuk masyarakat di pedesaan agar mendapat pelayanan kesehatan dengan mudah dan bermutu.

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang berada di setiap Kecamatan. Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah Puskesmas di Kabupaten Magetan berjumlah 22 unit yang terdiri dari 17 Puskesmas perawatan (6 Puskesmas PONED) dan 5 Puskesmas non perawatan yang tersebar di 18 Kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap penduduk sebesar 3,54 per 100.000 penduduk dilayani oleh 3-4 Puskesmas atau 1 Puskesmas melayani 28.240 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas di Kabupaten Magetan sudah memenuhi target nasional (1 Puskesmas rata-rata melayani 30.000 penduduk).

Keberadaan 59 Puskesmas Pembantu di Kabupaten Magetan semakin mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga telah dilaksanakan upaya untuk

memanfaatkan potensi dan sumberdaya di masyarakat dengan adanya 107 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), 935 Posyandu Balita dan 475 Posyandu Lansia diharapkan agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2020**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Kendaraan Operasional Roda Dua	155
2.	Kendaraan Operasional Roda Empat	71
3.	Meubelair	5.318
4.	Komputer unit/jaringan	8
5.	Personal Komputer	817

*Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020*

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkantor di Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan menggunakan fasilitas 11 ruangan. Sarana dan prasarana sebagai alat pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sudah cukup memadai namun masih diperlukan pemeliharaan agar sarana dan prasarana kerja tersebut supaya dapat bekerja secara optimal.

## **B. ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis masalah kesehatan yang diperkirakan muncul pada tahun-tahun mendatang dan perlu dilakukan antisipasi antara lain :

1. Meningkatnya pasien yang terkonfirmasi kasus Covid-19 sehingga perlu adanya pengendalian kasus tersebut dengan meningkatkan pengendalian di masyarakat diantaranya dengan penguatan tracing dan testing yang diperkuat oleh Satgas Covid-19, Babinkamtibmas dan Babinsa dengan melakukan koordinasi dengan Puskesmas, Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien dan keluarga, Pemeriksaan Swab, Peningkatan peran OPD untuk meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dikantor.
2. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
3. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas, optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman secara berkelanjutan dengan Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit.
4. Jaminan Kesehatan Nasional dengan total coverage bahwa seluruh penduduk Magetan harus memiliki asuransi/penjaminan kesehatan baik dengan BPJS Mandiri, BPJS ASN, PBI Nasional maupun PBI Daerah, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk penjaminan kesehatan.
5. Prevalensi Balita Stunting;  
Prevalensi stunting di Kabupaten sebesar 10,29% capaian 2020 mengalami penurunan sebesar 0,51% bila dibanding capaian tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketrampilan kader dalam menggunakan alat anthropometri dan melakukan pengukuran sesuai standar, serta semakin banyaknya posyandu yang memiliki alat anthropometri sesuai standar.

Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

6. Tercapainya Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magetan (73,40/100.000 Kelahiran Hidup) berhasil diturunkan bila dibanding Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 (110,58/100.000 KH) bisa diturunkan sebesar 37,18% capaian tersebut sudah memenuhi target nasional sebesar 102/100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian sebesar 73,40%.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magetan tahun 2020 sudah mencapai target, bilamana dibandingkan tahun 2019 ada penurunan sebesar 37,18% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Angka kematian Ibu per 100.000 KH adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas.

7. Tercapainya Angka Kematian Bayi (AKB)

Pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magetan (8,93/1000 Kelahiran Hidup) berhasil diturunkan bila dibanding Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 (9,71/1000 KH) bisa diturunkan sebesar 0,78% dengan capaian sebesar 100%. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magetan tahun 2020 sudah mencapai target, bilamana dibandingkan tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,78% dengan

capaian kinerja sebesar 100%. Angka kematian neonatal per 1.000 KH adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

8. Masih berkembangnya penyakit menular seperti TB Paru, HIV/AIDS, DBD;

Penyakit menular seperti TB Paru, HIV/AIDS, DBD, merupakan penyakit yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat.

9. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative;

Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.

10. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans PD3I (Penyakit Dapat Dicegah dengan Imunisasi) dengan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, analisa Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk mengidentifikasi daerah kantong, melakukan sweeping, peningkatan Surveilans Aktif Puskesmas, RS dan Fasyankes Swasta dalam deteksi dini PD3I serta sistem pencatatan dan pelaporan harus mengakomodir semua unit layanan yang ada termasuk swasta dan dilakukam kontrol yang baik



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Magetan selama kurun waktu tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kesehatan Kabupaten Magetan juga menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan tahunan yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

#### 1. VISI

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2018-2023 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah **“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA”**. Tujuan pembangunan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai dengan tahun 2023.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Misi :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil);
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Dengan Visi tersebut diatas diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan perlu dikembangkan paradigma baru bidang kesehatan. Jika sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai obyek, maka saat ini masyarakat didorong dan diberdayakan untuk mampu menjadi subyek. Masyarakat diberdayakan supaya menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ikut membantu mensukseskan ***misi yang pertama*** yaitu

**Misi 1** : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil) “.  
dengan program prioritas terkait bidang kesehatan yaitu :  
Pemantapan kemudahan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat luas

**Tujuan M1.T1 RPJMD Tahun 2018-2023 :**

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**Sasaran S 1.1 T1 RPJMD Tahun 2018-2023 :**

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator sasaran : Indeks Kesehatan

**- Strategi 1 :**

Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas

**Kebijakan :**

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi

**- Strategi 2 :**

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

**Kebijakan :**

Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ikut membantu mendukung pencapaian sasaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018-2023 dari sasaran lintas organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

**Sasaran S1.3 T 1 :**

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Indikator Sasaran : Angka Kemiskinan

**- Strategi :**

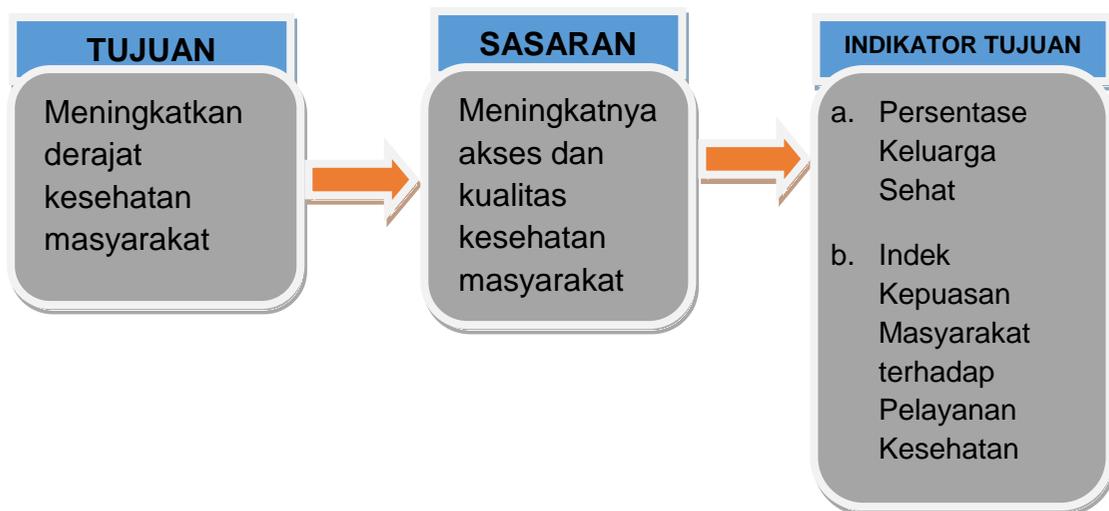
Menyelenggarakan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi maskin dan PMKS lainnya

**Kebijakan :**

Memberikan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage*

### 3. TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :



## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai.

Perjanjian dapat dilakukan perbaikan dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Indikator dan target kinerja dalam penetapan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2020. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1 Persentase Keluarga Sehat .	0,22 %
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat .	77 Indeks



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

### **A. CAPAIAN KINERJA**

#### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan

tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Analisa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 diukur dengan cara :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020, dimana target indikator kinerja Tahun 2020 telah sesuai dengan target indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020;

Skala penilaian pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Tercapai Target	
2	< 100%	Tidak Tercapai Target	

Berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
	<b><i>Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat</i></b>			
1	Persentase Keluarga Sehat (%)	0,21	0,23	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) terhadap Pelayanan Kesehatan	77	90,39	100

Berikut hasil Capaian Indikator Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 :

No	Indikator Tujuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
	<b><i>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</i></b>			
1	Usia Harapan Hidup	72,20	72,59	100

Selain Indikator Kinerja Utama, terdapat Indikator Kinerja Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 :

No	Indikator Kinerja Prioritas	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal	100 %	95 %	95 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	100 %	100 %	100 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	100 %	100 %
4.	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	100 %	100 %	100 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	87 %	87 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	100 %	73 %	73 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	100 %	75 %	75 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %	56 %	56 %

No	Indikator Kinerja Prioritas	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes Melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 %	100 %	100 %
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	100 %	100 %	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	80 %	86 %	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV	100 %	96 %	96 %
13.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	<102 %	73,40 %	100 %
14.	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	< 21%	8,93 %	100 %
14.	Prevalensi Balita Stunting	29 %	10,29 %	100 %
	Indikator Kinerja RSUD			
1.	BOR	78 %	63 %	84 %
2.	ALOS	4 hari	3,6 hari	90 %
3.	TOI	3 hari	2,7 hari	90 %
4.	BTO	40-50 kali	52,4 kali	100 %
5.	NDR	≤ 18‰	27,6 ‰	100 %
6.	GDR	≤ 33‰	52,1‰	100 %
7.	Infeksi Nosokomial	≤ 4,5‰	0.2‰	100 %

## 2. Analisa Capaian Kinerja

### a. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebanyak 2 indikator.

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.**



#### 1. Persentase Keluarga Sehat (%)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran "*Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat*" adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENST RA (2020)	Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2020
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Keluarga Sehat (%)	0,21	0,22	0,23	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Persentase Keluarga Sehat pada Tahun 2020 sudah tercapai yaitu 100% yang didalamnya terdapat 12 indikator PHBS yaitu sebagai berikut :

#### 1. Keluarga mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) "***Keluarga mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)***" adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Cakupan Keluarga mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)	55,61	81	43,11	53,22

Pada indikator yang pertama, Keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB), pasangan usia subur (PUS) dapat menggunakan metode KB yang sesuai, diharapkan ibu bersalin untuk dapat menggunakan KB segera setelah melahirkan. Ada beberapa manfaat ber-KB diantaranya dapat mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengatur dan menjarangkan kehamilan, meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, dan dapat menurunkan resiko kematian ibu dan bayi.

Capaian keluarga mengikuti program KB menurut hasil pendataan PIS-PK tahun 2020 adalah 43,11%. Capaian tersebut masih belum memenuhi target yang diharapkan yaitu sebesar 81%. **Permasalahan** yang menyebabkan rendahnya cakupan indikator keluarga mengikuti Program KB adalah penambahan jumlah keluarga yang didata, adanya PUS yang tidak ber KB karena pasangan sudah menopause, pasangan masih menginginkan anak, ibu belum ber KB setelah melahirkan maupun pasangan berada di luar kota. **Solusi** yang dilakukan adalah dengan melaksanakan update data melalui kunjungan rumah.

2. Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	95,23	81	95,43	100

Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan akan membuat ibu selamat dan bayi sehat. Ada sejumlah manfaat bersalin difasilitas pelayanan kesehatan diantaranya dengan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Ibu juga akan dapat memperoleh pelayanan KB segera setelah melahirkan, dapat menggunakan JKN-KIS/JAMPERSAL sebagai sumber pembiayaan, ibu dan bayi mendapatkan penanganan segera jika sewaktu-

waktu terjadi komplikasi, bayi akan mendapatkan IMD (inisiasi menyusui dini) dan juga bayi akan mendapatkan seluruh perawatan yang diperlukan termasuk juga imunisasi.

Capaian indikator persalinan ibu di fasyankes tahun 2020 adalah 95,43% meningkat 0,20% dari tahun 2019. **Permasalahan** : berdasarkan data cakupan SPM Dinas Kesehatan Kab. Magetan tahun 2020 semua persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan (100%). Di laporan website Keluarga Sehat data belum diupdate. **Solusi** : bidan desa bersama kader melakukan pendampingan kepada ibu hamil terutama ibu hamil resiko tinggi dan melakukan updating data yang ada di website Keluarga Sehat.

3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	98,01	81	98,07	100

Bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi dasar lengkap untuk bayi dapat diperoleh di Posyandu, Puskesmas, Dokter, Dokter Spesialis Anak, bidan praktik dan juga di rumah bersalin.

Cakupan indikator bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2020 adalah 98,07%, sudah memenuhi target yang diharapkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap adalah dengan melakukan validasi data, sweeping balita yang tidak diimunisasi, karena pandemi imunisasi dilaksanakan dengan cara janji temu dengan petugas di fasyankes.

4. Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	91,74	81	92,54	100

Bayi mendapat ASI Eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI saja dari usia 0-6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia bayi 2 tahun. Ibu menyusui sampai 2 tahun lebih hemat dan anak akan tumbuh kembang secara optimal. Anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Manfaat ASI bayi diantaranya adalah 1). sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan; 2). Bayi tidak mudah sakit; 3). Meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi; 4). Menunjang tumbuh kembang yang optimal. Sedangkan manfaat ASI bagi ibu diantaranya adalah dapat mengurangi resiko kanker payudara, mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kandungan, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan dan dapat menunda kehamilan.

Cakupan indikator bayi mendapatkan Asi Eksklusif tahun 2020 adalah 92,54% sudah memenuhi target. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pemberian ASI eksklusif untuk bayi.

5. Pertumbuhan balita dipantau

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Pertumbuhan balita dipantau”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Pertumbuhan balita dipantau	97,68	81	97,77	100

Balita mendapat pemantauan pertumbuhan, balita harus dibawa ke posyandu untuk ditimbang setiap bulan. Di posyandu balita akan

ditimbang setiap bulan sejak lahir sampai usia 5 tahun. Pemantauan pertumbuhan balita ini bermanfaat untuk mengetahui status pertumbuhan balita, sebagai deteksi dini gangguan pertumbuhan balita, Ibu mendapat penyuluhan gizi pertumbuhan balita. Manfaat lain balita selalu dibawa ke Posyandu adalah agar orang tua dapat selalu memantau pertumbuhan balita, mendapat kapsul vitamin A, mendapat imunisasi lengkap, tempat mendapatkan makanan tambahan bergizi.

Cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Kabupaten Magetan sudah memenuhi target yaitu 97,77%. Upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan posyandu balita sesuai dengan protokol kesehatan di desa / kelurahan zona hijau, untuk desa / kelurahan zona merah pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita dengan cara janji temu dengan petugas kesehatan di fasyankes maupun dengan kunjungan rumah terutama untuk balita risiko tinggi (gizi kurang / buruk).

6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	29,53	81	34,25	42,28

Penderita TB Paru mendapat pengobatan sesuai standar. Gejala TB diantaranya adalah batuk berdahak, sesak nafas dan nyeri dada, badan lemas, nafsu makan berkurang, dan demam meriang berkepanjangan, Gejala lainnya adalah berat badan menurun, dan adanya kontak dengan pasien TB. Bila ada salah satu atau lebih gejala di atas segera periksa ke Puskesmas. Untuk mengetahui orang sakit TB harus dilakukan pemeriksaan dahak. Bila hasil pemeriksaan positif, maka harus diberi pengobatan selama 6 bulan secara terus menerus, tidak boleh putus sampai sembuh. Selama proses pengobatan lakukan pemeriksaan rutin ke Puskesmas. Pemeriksaan dahak dilakukan pada satu akhir tahap awal (intensif) yaitu akhir bulan kedua atau ketiga akhir bulan, pemeriksaan dahak diulang pada akhir bulan kelima,

dan untuk memastikan pasien sembuh pemeriksaan dahak diulang pada akhir periode pengobatan.

Cakupan indikator Penderita TB Paru berobat sesuai standar masih dibawah target nasional yaitu 34,25%. **Permasalahan** : pada saat dilakukan pendataan dan intervensi awal ditemukan anggota rumah tangga dengan gejala TB Paru (batuk lebih dari 2 minggu). **Solusi** : koordinasi dengan Penanggungjawab Program P2 TB untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka penderita TB Paru dan melakukan updating data di website Keluarga Sehat.

7. Penderita hipertensi yang berobat teratur

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Penderita hipertensi yang berobat teratur ”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Penderita hipertensi yang berobat teratur	29,41	81	34,87	43,05

Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi adalah sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah dan lain-lain. Mengendalikan hipertensi bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur. Pengobatan secara teratur adalah : meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter dan melakukan kontrol teratur. Ada sejumlah faktor resiko hipertensi. Faktor resiko tersebut ada yang merupakan faktor resiko yang tidak dapat diubah yaitu umur jenis kelamin dan riwayat keluarga. Dan ada juga faktor resiko yang dapat diubah seperti merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih/kegemukan, dislipidemia dan stres. Komplikasi hipertensi : gangguan jantung, gangguan saraf, gangguan serebral, gangguan fungsi ginjal, gangguan penglihatan. Untuk mencegah hipertensi bisa dengan menerapkan perilaku CERDIK, Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan

asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola stres.

Cakupan indikator Penderita Hipertensi berobat teratur di Kabupaten Magetan masih dibawah target nasional yaitu 34,87 %. **Permasalahan** : pada saat dilakukan pendataan dan intervensi awal ditemukan anggota rumah tangga dengan hasil pengukuran tekanan darah > 140/90 mmhg yang tidak berobat, penderita tidak pernah melakukan cek tekanan darah secara rutin, pemanfaatan UKBM (posyandu lansia dan posbindu PTM) tidak maksimal / tutup karena adanya pandemi. **Solusi** : koordinasi dengan Penanggungjawab Program PTM untuk melakukan intervensi lanjutan kepada penderita hipertensi yang tidak berobat teratur.

8. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	47,92	81	10,90	13,45

Indikator Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan. Gangguan jiwa dapat diobati jika ditangani sedini mungkin. Peran keluarga sangat penting dalam memperhatikan dan mendeteksi dini gejala perubahan emosi, perilaku dan pola/isi pikir yang tidak wajar dari anggota keluarga. Hal yang harus diperhatikan adalah apabila ada anggota keluarga yang dipasung agar segera dilaporkan kepada kader/puskesmas setempat untuk dapat ditangani sebagaimana mestinya.

Indikator Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan di Kabupaten Magetan masih belum mencapai target, capaiannya tahun 2020 yaitu sebesar 10,90%. **Permasalahan** : permasalahan pada aplikasi website Keluarga Sehat saat melakukan updating data secara otomatis pada indikator penderita gangguan jiwa dipasung berubah menjadi “Ya” sehingga pada indikator tersebut bernilai “T” padahal di KK tersebut tidak ada penderita gangguan jiwa **Solusi** :

sudah melaporkan kepada admin Provinsi Jatim permasalahan tersebut agar segera ditindaklanjuti ke tingkat Pusat.

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) "**Anggota keluarga tidak ada yang merokok**" adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	50,08	81	52,13	64,35

Anggota keluarga tidak ada yang merokok. Rokok itu sebenarnya adalah racun. Dalam satu batang rokok yang dibakar, mengandung 4000 zat kimia beracun dan sebagian diantaranya adalah bersifat karsinogenik. Racun utama yang terdapat dalam sebatang rokok adalah tar, nikotin, dan karbonmonoksida.

Cakupan indikator anggota keluarga tidak merokok tahun 2020 sebesar 52,13%, cakupan meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yaitu mengalami peningkatan sebesar 2,05% **Permasalahan** : masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan, masih sulitnya perubahan perilaku masyarakat khususnya perilaku tidak merokok, kurangnya media promosi kesehatan tentang bahaya merokok. **Solusi** : meningkatkan upaya promosi kesehatan tentang bahaya merokok baik di masyarakat maupun di institusi pendidikan, pembentukan kawasan tanpa rokok di institusi institusi pemerintah.

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	46,42	81	47,95	59,19

Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN. Menjadi anggota JKN adalah sesuatu yang sangat penting bagi keluarga. Hal ini untuk menjamin anggota keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Cakupan Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 menurut hasil pendataan keluarga sehat belum memenuhi target yaitu sebesar 47,95% namun capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 1,53%.

**Permasalahan** : sebagian masyarakat keberatan untuk mengikuti program JKN secara mandiri. **Solusi** : koordinasi dengan pihak BPJS untuk melakukan sosialisasi program JKN di masyarakat.

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Keluarga mempunyai akses sarana air bersih”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	99,12	81	99,14	100

Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Sarana air bersih sangat penting untuk mencapai keluarga sehat. Harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air, dan dilengkapi dengan

saluran pembuangan air, tidak ada kotoran atau kuman pencemar air dan memenuhi syarat-syarat air yang bersih.

Cakupan keluarga mempunyai akses sarana air bersih sudah memenuhi target yaitu sebesar 99,14%. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatan inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih yang digunakan oleh masyarakat, melakukan pemeriksaan / uji sampel bakteriologis air bersih secara rutin.

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Capaian indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) **“Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat”** adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	97,28	81	96,85	100

Menggunakan/mempunyai akses jamban keluarga. Manfaat Buang Air Besar dan Kecil di jamban diantaranya adalah : 1). Lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, 2). Tidak mencemari sumber air dan tanah yang ada disekitarnya, 3). Tidak mengundang lalat/kecoa/serangga yang dapat menularkan penyakit sehingga semua anggota keluarga akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang biasa disebabkan oleh kegiatan buang air besar sembarangan seperti infeksi saluran pencernaan, tifus, kecacingan, diare, dan disentri.

Capaian indikator keluarga yang mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat sudah memenuhi target yaitu 96,85%. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan monitoring peningkatan akses jamban masyarakat, peningkatan kualitas dari jamban sehat semi permanen ke jamban sehat permanen melalui pelatihan tukang sanitasi dan pemberian stimulan jamban untuk keluarga miskin.

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENSTRA (2020)	Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2020
			Target (Indeks)	Realisasi (%)	% Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	86,45 %	77	90,39	100	77	100 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Pada tahun 2020 Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 90,39% dengan Kategori Baik sedangkan Tahun 2019 sebesar 86,45% dengan kategori Baik sehingga mengalami kenaikan sebesar 3,94%, dengan capaian 100%.



Laporan hasil survey kepuasan masyarakat ini memuat dua hal besar, yaitu skor kepuasan atas pelayanan Puskesmas berdasarkan 9 dimensi pelayanan se Kabupaten (22 Puskesmas) dan hasil survey pada masing-masing Puskesmas. Hasil survei disusun dalam bentuk laporan

yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang kepuasan masyarakat atas pelayanan Puskesmas di Kabupaten Magetan berdasarkan 9 dimensi kepuasan pelanggan. Hasil analisis data yang didapatkan akan dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan, upaya perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja untuk pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas dilaksanakan pada bidang-bidang di Dinkes, titik pelayanan di Puskesmas meliputi : TPP (Tempat Pendaftaran Pasien), Klinik Umum, Klinik Gigi, KIA, Kamar Obat, UGD, Laboratorium, Rawat Inap, kemudian ditambah dengan pelayanan di Puskesmas Pembantu dan Ponkesdes, titik pelayanan di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Labkesda.

Data dalam survey ini dikumpulkan dari seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Magetan, sebanyak 22 Puskesmas, ditambah Kantor Dinas

Kesehatan, IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten) dan Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah). Tenaga surveyor berasal dari Dinkes, Puskesmas dan UPTD IFK dan UPTD Labkesda, dengan mendapatkan pembekalan secara khusus. Selanjutnya data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk selanjutnya dikonfirmasi dengan standar nilai yang ditentukan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ruang lingkup Survei kepuasan Masyarakat memuat 9 dimensi pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Kompetensi Petugas
3. Prosedur Pelayanan
4. Perilaku Petugas
5. Kecepatan Waktu Pelayanan
6. Sarana dan Prasarana
7. Kewajaran Biaya
8. Penanganan Pengaduan
9. Kesesuaian Produk Pelayanan



Hasil analisis Rerata Kepuasan Masyarakat berdasarkan dimensi pelayanan 22 UPTD Puskesmas, Kantor Dinkes, UPTD IFK dan UPTD Labkesda secara kumulatif menempatkan dimensi penanganan pengaduan memiliki rata-rata paling tinggi sebesar 94,31%, sedangkan dimensi sarana prasarana merupakan layanan dengan nilai paling rendah sebesar 88,05%.

Secara umum dimensi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang mendapatkan nilai tinggi adalah penanganan pengaduan, kewajaran harga dan Prosedur pelayanan. Sebuah hasil yang memberi gambaran bahwa masyarakat memberi apresiasi sangat baik terhadap kinerja puskesmas, Kantor Dinkes, IFK dan labkesda. Selama tahun 2020 masih ada kritik dari masyarakat terhadap pelayanan UPTD Puskesmas kepada masyarakat, tentu kritik tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis data hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 diketahui bahwa penanganan pengaduan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 94,31%, hal ini berarti respon Dinas Kesehatan serta UPTD nya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mendapat apresiasi yang

bagus dari masyarakat artinya masyarakat telah mendapatkan feedback/tindaklanjut terhadap pengaduan yang diajukan dengan memuaskan, selanjutnya biaya/tarif layanan di Puskesmas juga mendapat nilai bagus sebesar 92,86% yang artinya masyarakat mendapatkan pelayanan memuaskan di Puskesmas dengan biaya murah.

Sedangkan dimensi yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sarana dan prasarana (dimensi 6) serta kecepatan waktu pelayanan (dimensi 5). Artinya UPTD Dinkes di antaranya Puskesmas perlu terus berbenah agar sarana dan prasarana puskesmas dalam mendukung pelayanan kepada pasien senantiasa terpenuhi sesuai standar dan terjaga baik kebersihan, kerapian dan terpelihara dengan baik (jika ada kerusakan segera dilakukan perbaikan). Manajemen puskesmas perlu terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan *respon time* yang baik apalagi dimasa pandemi covid-19 dimana kapasitas ruang tunggu, prosedur melayani pasien berbeda menyesuaikan kondisi pandemi menuntut inovasi para tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan analisis data hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di UPTD Dinkes Magetan (22 Puskesmas, IFK dan Labkesda) menunjukkan sebanyak 62% UPTD mendapatkan nilai dengan kategori mutu sangat baik (15 UPTD), sedangkan 38% mendapatkan predikat mutu baik (9 UPTD). UPTD dengan nilai SKM paling tinggi adalah Puskesmas Poncol dengan nilai 3,988.

Dari 9 dimensi pelayanan yang sangat baik antara lain : unsur penanganan pengaduan dan kewajaran harga, rekomendasinya terus dipertahankan. Unsur yang memiliki nilai baik adalah sarana dan prasarana. Rekomendasinya perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Dari hasil survei menunjukkan bahwa 3 (tiga) puskesmas yang mendapat nilai terendah yang perlu ditingkatkan adalah Puskesmas Kartoharjo, Puskesmas Ngujung dan Puskesmas Lembeyan. Bukan berarti ketiganya jelek, tetapi pelayanannya masih dibawah Puskesmas dan UPTD lainnya. Pelayanan yang perlu lebih diperhatikan adalah sarana dan prasarana dan kecepatan waktu pelayanan.

#### **Kesimpulan :**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan atas 9 dimensi layanan Dinkes dan UPTD nya yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan prasarana (Dimensi 6), Kecepatan Waktu Pelayanan (Dimensi 5) dan

Persyaratan pelayanan (Dimensi 1), yang perlu dipertahankan adalah penanganan pengaduan (Dimensi 8) dan kewajaran biaya (Dimensi 7).

2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada masing-masing unit pelayanan di Puskesmas dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan predikat Mutu sangat baik sebanyak 16 Puskesmas/Kantor/UPTD (62%), sedangkan yang mendapatkan predikat baik sebanyak 9 puskesmas (38%).

**Rekomendasi :**

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama penanganan pengaduan (Dimensi 8) dan kewajaran biaya (Dimensi 7).
2. Perlu peningkatan terhadap sarana dan prasarana (Dimensi 6) terutama pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar diikuti pemeliharaan dan kalibrasi sesuai standar, selanjutnya kecepatan waktu pelayanan (Dimensi 5) di masa pandemi dan perkembangan IT maka diperlukan inovasi agar pelayanan masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik serta kejelasan persyaratan pelayanan kepada masyarakat (Dimensi 1) perlu ditingkatkan.
3. Perlu meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas dalam memberikan pelayanan, dengan cara memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
5. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
6. Kegiatan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, untuk menilai :

- a. Apakah perbaikan telah dilakukan dan memberikan dampak peningkatan kepuasan pelanggan.
- b. Apakah ada inovasi dari masing-masing satuan kerja penyedia layanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikannya.

### 3. Capaian Indikator Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

#### 1. Prevalensi Balita Stunting

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENSTRA (2020)	Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2020
		Bulan Timbang	Target	Realisasi Berdasarkan bulan Timbang	% Capaian		
1.	Prevalensi Balita Stunting	10,8%	< 29 %	10,29 %	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan hasil pengukuran Bulan Timbang tahun 2020 prevalensi balita stunting di Kabupaten Magetan sebesar 10,29 % capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,51% bila dibanding capaian tahun 2019 sehingga capaian tahun 2020 sudah memenuhi target. Adanya penurunan Balita Stunting di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketrampilan kader dalam mempergunakan alat anthropometri dan melakukan pengukuran sesuai standar, serta semakin banyaknya posyandu yang memiliki alat anthropometri sesuai standart yang bisa dipenuhi dari dana desa.

Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat)



dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak

keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.



Prevalensi stunting di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 sebesar 10.29 %, capaian 2020 mengalami penurunan sebesar 0.51 % bila dibanding capaian tahun 2019, capaian tersebut sudah memenuhi target tahun 2020. Selama tahun 2020 telah dilakukan upaya secara optimal untuk mengatasi stunting di Kabupaten Magetan. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 antara lain :

- a. Pemberian Makanan Tambahan balita kurang gizi dan Bumil KEK
- b. Pemberian Vitamin A kepada Balita dan Ibu Nifas
- c. Pemberian Tablet Fe untuk ibu hamil dan remaja putri
- d. Orientasi pemberian makanan bayi dan anak
- e. Orientasi motivator ASI
- f. Bimbingan teknis kepada petugas kesehatan
- g. Pertemuan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting
- h. Orientasi pelaksanaan Posyandu Balita
- i. Orientasi Surveilans Gizi

2. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENSTRA (2020)	Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2020
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	110,58%	<102%	73,40%	100%	<102%	100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magetan (73,40/100.000 Kelahiran Hidup) berhasil diturunkan bila dibanding Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 (110,58/100.000 KH) bisa diturunkan sebesar 37,18% capaian tersebut sudah mencapai target nasional sebesar 102/100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian sebesar 73,40 %.



Angka Kematian Ibu adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas.

Masih adanya kematian ibu di Kabupaten Magetan disebabkan oleh penyebab langsung perdarahan 50%, Pre-eklampsia dan Eklampsia sebesar 16,6%. Selanjutnya karena penyebab tidak langsung TBC sebesar 16,6% dan jantung 16,6%. Meskipun Angka Kematian Ibu dapat diturunkan namun akibat pandemi Covid 19 terjadi permasalahan baik ditingkat fasilitas pelayanan dasar dan rujukan.

Permasalahan ditingkat dasar kurangnya pemantauan ibu hamil akibat pembatasan layanan (physical distancing), terbatasnya APD saat awal pandemi serta beralihnya peran petugas dalam penanganan covid-19. Selain itu permasalahan di tingkat rujukan disebabkan kapasitas ruang isolasi untuk maternal terbatas dan belum tersedianya ruang operasi khusus covid yang mengakibatkan jika harus dilakukan tindakan operasi Caesar di ruang operasi biasa maka akan mengganggu pelaksanaan operasi yang lainnya.

Adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Magetan maka jumlah ibu hamil yang terpapar juga semakin banyak, sedangkan skrining hanya menggunakan rapid yang sensitifitasnya rendah sehingga pemerintah Kabupaten Magetan memutuskan bagi ibu hamil diwajibkan untuk melaksanakan tes swab menjelang persalinan.

Tujuan pemeriksaan Swab RT PCR merupakan tatalaksana pada ibu hamil yang akan melakukan persalinan yang harus dilakukan untuk mengetahui hasilnya positif ataupun negatif maka diwajibkan ibu hamil tersebut harus berdiam diri dirumah sampai dengan proses persalinan tiba



untuk mengurangi risiko terpapar covid-19, selain terbatasnya ruang isolasi di RS rujukan Covid juga menjadi kendala sehingga ibu bersalin terlambat mendapatkan pertolongan persalinan,

meskipun demikian pada tahun 2020 tidak terdapat kematian ibu yang disebabkan Covid-19 di Kabupaten Magetan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu selama tahun 2020 adalah :

- a. Pendampingan ibu hamil oleh kader Mayangsari
- b. Pelaksanaan kelas ibu hamil dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA
- c. Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan KIA
- d. Pembinaan Puskesmas PONEK oleh Tim PONEK
- e. Workshop Sosialisasi Tatalaksana Ibu Hamil dan Balita dengan Covid-19
- f. Audit Maternal dan Perinatal
- g. Workshop Peningkatan Kapasitas petugas dalam kegawatdaruratan Maternal dan Perinatal
- h. Komunikasi dan Koordinasi rujukan dengan jejaring antara Puskesmas/Klinik,RSU/RSIA tipe C,RSU Tipe B se-Karesidenan Madiun melalui WAG Jaberned Magetan.
- i. Pertemuan koordinasi rujukan ibu bersalin di masa Pandemi Covid-19 dengan penerbitan SE Bupati No.414/2805/403.109/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rujukan Ibu Hamil/Bersalin di masa pandemi Corona Virus Disease di Kabupaten Magetan.

3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENS TRA (2020)	Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2020
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	9,71 %	< 21 %	8,93%	100%	<21%	100%

Pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magetan (8,93/1000 Kelahiran Hidup) berhasil diturunkan bila dibanding Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 (9,71/1000 KH) bisa diturunkan sebesar 0,78% dengan capaian sebesar 100%.

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun.



Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magetan tahun 2020 sudah mencapai target, bilamana dibandingkan tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,78% dengan capaian kinerja sebesar 100%.



Angka kematian neonatal per 1.000 KH adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang

diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal

2. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus kematian bayi dengan narasumber Dokter Spesialis Obgyn (DSOG) dan Dokter Spesialis Anak (DSA) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
3. Pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko tinggi.
4. Pelaksanaan kelas ibu balita dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA.
5. Untuk menurunkan kasus BBLR dan kelainan bawaan pada bayi, dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, demi mempersiapkan reproduksi yang berkualitas bagi calon ibu diantaranya : Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja dan Edukasi untuk calon pengantin dengan menggunakan buku buku Catin.
6. Pembinaan pelayanan maternal dan neonatal bagi faskes primer.
7. Terbentuknya jejaring antara Puskesmas/Klinik-RSU/RSIA Tipe C-RSU Tipe B se-Karesidenan Madiun untuk mempermudah komunikasi rujukan maternal dan neonatal melalui WAG Jabaned Magetan.
8. Penguatan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan) dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan berfungsinya Tim Penakib (Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi).
9. Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas.

#### 4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bidang kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan. Pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN	REALISASI (A)	TARGET/ SASARAN (B)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	95 %	100%	95 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %	100%	100 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100 %	100%	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	87 %	100%	87 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	73 %	100%	73 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	75 %	100%	75 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	56 %	100%	56 %
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100 %	100%	100 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %	100%	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	86 %	80%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	96 %	100%	96 %

ata : Dinas Kesehatan kabupaten Magetan

##### 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal

satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Persentase Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar pelayanan antenatal

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal	97,05%	95%	100 %	95%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar pada tahun 2020 masih di bawah target nasional (100%) dengan capaian kinerja 95%, mengalami penurunan sebesar 2,05 % dari capaian tahun 2019.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan.

Pelayanan persalinan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan adalah persalinan ibu yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Persentase Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	98,52%	100%	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan persalinan pada tahun 2020 sudah memenuhi target nasional (100%) dengan capaian kinerja 100%, mengalami kenaikan sebesar 1,48 % dari capaian tahun 2019.

3). Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	101.62%	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2020 sudah mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja 100%.

4). Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Presentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan kesehatan Balita

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	98,06%	100%	100 %	100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita pada tahun 2020 sudah mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja 100 %, sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,94 % dari capaian tahun 2019.

5). Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Persentase Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	97,16%	87 %	100 %	87 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 masih di bawah target nasional (100%), turun 10,06 % dari capaian tahun 2019.

6). Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari

persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 7 Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	84,06%	73 %	100 %	73 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif pada tahun 2020 masih di bawah target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 73 %, mengalami penurunan sebesar 11,06 % dibanding tahun 2019.

7). Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut  
sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	93,10%	75 %	100 %	75 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut pada tahun 2020 masih di bawah standar nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 75% mengalami penurunan sebesar 18,10 % dari capaian tahun 2019.

8). Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi. Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 9 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi  
sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	52,94 %	56 %	100 %	56 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pada tahun 2020 masih di bawah standar nasional (100%), akan tetapi mengalami kenaikan sebesar 3,06 % dari tahun 2019 dengan capaian kinerja sebesar 56 %.

9). Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Kabupaten Magetan. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya. Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%) Kinerja
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	97,39%	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase penyandang Diabetes Mellitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus pada tahun 2020 sudah memenuhi standar nasional (100%), dengan capaian kinerja sebesar 100 %, naik sebesar 2,61 % dari capaian kinerja tahun 2019.

#### 10). Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, pelayanan tersebut meliputi pelayanan promotif preventif untuk meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi: Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau Tindakan kebersihan diri ODGJ berat. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 11 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	95,13%	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pada tahun 2020 sudah memenuhi standar nasional (100%), dengan capaian kinerja sebesar 100 %, naik sebesar 4,87 % dari capaian kinerja tahun 2019..

11). Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain : Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.12 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2019		
1.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	100 %	86 %	80 %	100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB pada tahun 2020 sudah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 100%.

12).Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai

kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai pemeriksaan HIV sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.13 Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian Kinerja (%)
		2019	2020		
1.	Pelayanan kesehatan orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	117,52 %	96 %	100 %	96 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Magetan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase Pelayanan Kesehatan orang Berisiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai standar pada tahun 2020 belum memenuhi target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 96 %, mengalami penurunan sebesar 21,52 % dari capaian kinerja tahun 2019.

### 5. Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan.

Merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang dapat menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu untuk mengukur kinerja rumah sakit. Capaian indikator kinerja RSUD dr. Sayidiman di Kabupaten Magetan selama 2019-2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Indikator Kinerja RSUD Tahun 2019 -2020**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian kinerja RPJMD
		2019	2020		
1	BOR	86 %	63%	78%	84 %
2	ALOS	3,2 Hari	3,6 Hari	4 Hari	90 %
3	TOI	0,7 Hari	2,7 Hari	3 Hari	90 %
4	BTO	75,4 kali	52,4 Kali	40-50 Kali	100 %
5	NDR	16,8‰	27,6 ‰	≤ 18‰	100 %
6	GDR	33,3‰	52,1 ‰	≤ 33‰	100 %
7	Infeksi Nosokomial	0,28‰	0,2 ‰	≤ 4,5‰	

Sumber Data : RSUD dr. Sayidiman

Berdasarkan tabel tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

*Bed Occupancy Rate (BOR)* adalah indikator yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit pada satu satuan waktu tertentu. Capaian BOR pada tahun 2019 sebesar 86% dan tahun 2020 sebesar 63%, mengalami penurunan sebesar 23%. Pencapaian BOR tahun 2020 mengalami penurunan 23%. Sehingga untuk efektifitas dan efisiensi jumlah TT perlu dilakukan pemetaan kembali sebagai perencanaan di tahun 2021.

b. *Average Length of Stay (ALOS)* adalah indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, untuk mengukur rata-rata lama perawatan pasien di rumah sakit, juga untuk menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Target ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Berdasarkan tabel di muka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lama pasien dirawat di rumah sakit hanya sekitar 3 hari. Hal ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan yang baik karena lama perawatan yang minimal,

namun perlu dikaji tentang *outputnya* pasien dapat pulang dengan sembuh, rujuk dan ataukah meninggal, serta perlu ditinjau kasus-kasus readmisi.

- c. *Turn Over Interval (TOI)* adalah indikator yang menunjukkan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Capaian TOI tahun 2020 adalah sebesar 2,7 atau kurang dari tiga hari. Hal ini dikarenakan beberapa ruangan yang tingkat kunjungan melebihi tempat tidur yang disediakan sehingga sebelum pasien yang pulang tempat tidur tersebut sudah ada yang antri untuk dipakai kembali. Capaian ini dilihat dari segi ekonomi sangat menguntungkan akan tetapi bisa merugikan pasien karena tempat tidur tidak sempat disiapkan secara baik untuk pasien berikutnya dan dapat mengakibatkan infeksi nosokomial sehingga kepuasan dan keselamatan pasien berkurang (*patient safety*).
- d. *Bed Turn Over (BTO)* adalah indikator yang menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Nilai BTO ideal adalah 40 – 50 kali. Dari tabel di bawah dapat kita lihat bahwa nilai BTO melebihi nilai ideal yang artinya bahwa dengan meningkatnya jumlah pasien rawat inap meningkat pula kebutuhan tempat tidur. Frekuensi pemakaian tempat tidur yang tinggi mempunyai korelasi dengan rata-rata lama perawatan pasien di rumah sakit. Semakin pendek lama perawatan pasien maka akan semakin tinggi frekuensi pemakaian tempat tidur.
- e. *Net Death Rate (NDR)*  
*Net death rate* (NDR) atau angka kematian bersih menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir (BBL) yang kemudian meninggal. Jadi, pasien yang meninggal sebelum 48 jam perawatan inap tidak dimasukkan dalam hitungan statistik ini. Batasan 48 jam ini dimaksudkan sebagai gambaran bahwa pihak rumah sakit sudah mendapat cukup waktu untuk berusaha memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam, diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien tersebut bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis tapi karena memang kondisi pasien yang sudah sakit berat. Angka NDR lebih bisa menunjukkan kualitas pelayanan medis dibandingkan angka GDR. Untuk menghitung NDR dalam suatu periode digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000 \text{ ‰}$$

Menurut Depkes nilai NDR sebaiknya  $\leq 25$ , indikator ini dapat memberi gambaran mutu pelayanan di rumah sakit, pada umumnya semakin tinggi kelas rumah sakit maka jenis pelayanan yang diberikan semakin lengkap dan kasus-kasus yang ditangani juga semakin berat dengan resiko kematian lebih tinggi.

f. *Gross Death Rate (GDR)*

*Gross Death Rate* atau angka kematian kasar menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Untuk menghitung GDR digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien rawat inap yang meninggal}}{\text{Jumlah pasien keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000 \text{ ‰}$$

Menurut Depkes nilai GDR sebaiknya  $\leq 45\%$ , indikator GDR memberikan penilaian terhadap mutu pelayanan rumah sakit, meskipun nilai GDR sangat dipengaruhi oleh jumlah pasien mati <48 jam yang pada umumnya adalah kasus gawat darurat. Semakin tinggi kelas rumah sakit, maka angka kematian kasarnya (GDR) semakin besar. Hal ini dikarenakan fungsinya sebagai tempat rujukan dalam menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh rumah sakit dibawahnya.

Pada tahun 2020 ini capaian GDR adalah 52,1 ‰ mengalami kenaikan 18,8%, hal tersebut disebabkan RSUD dr. Sayidiman Magetan merupakan rumah sakit rujukan sehingga pasien yang datang sudah dengan penyakit komplikasi selain karena usia yang sudah lanjut.

g. *Infeksi Nosokomial*

Capaian HAIs (*Health Associated Infections*) tahun 2020 sebesar 3,4 permil masih melebihi standar indikator yang ditetapkan, yaitu 1 permil. Maka Tim PPI melakukan analisa PDSA melibatkan manajemen dan seluruh bidang terkait di Rumah Sakit untuk melakukan strategi penurunan HAIs antara lain dengan :

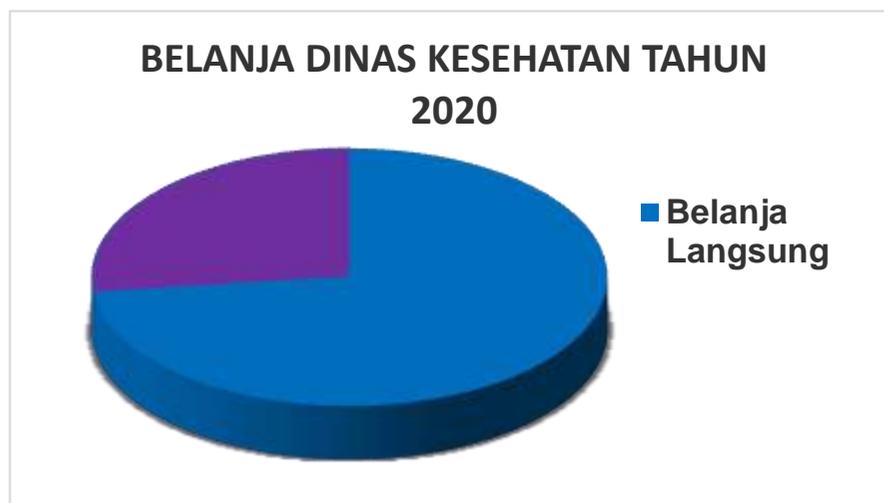
1. Penggantian dressing lama dengan transparan dressing
2. Penggantian intravena catheter max 3x24 jam dari pemasangan
3. Penerapan one syringe, one prosedur dan one time injeksi

4. Flushing port insersi, post injeksi one dose
5. Larangan manipulasi stempel pada IV catheter
6. Meningkatkan tehnik aseptik saat insersi
7. Meningkatkan tehnik aseptik saat injeksi

Sehingga di tahun 2020 HAIs turun menjadi 0,08 permil.

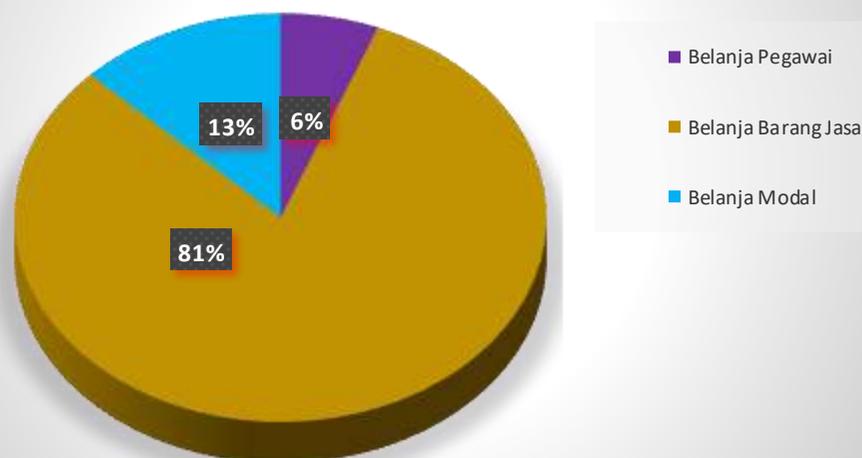
## B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 309.401.477.099,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 261.365.280.534,55,- atau serapan dana APBD mencapai 84,47%.

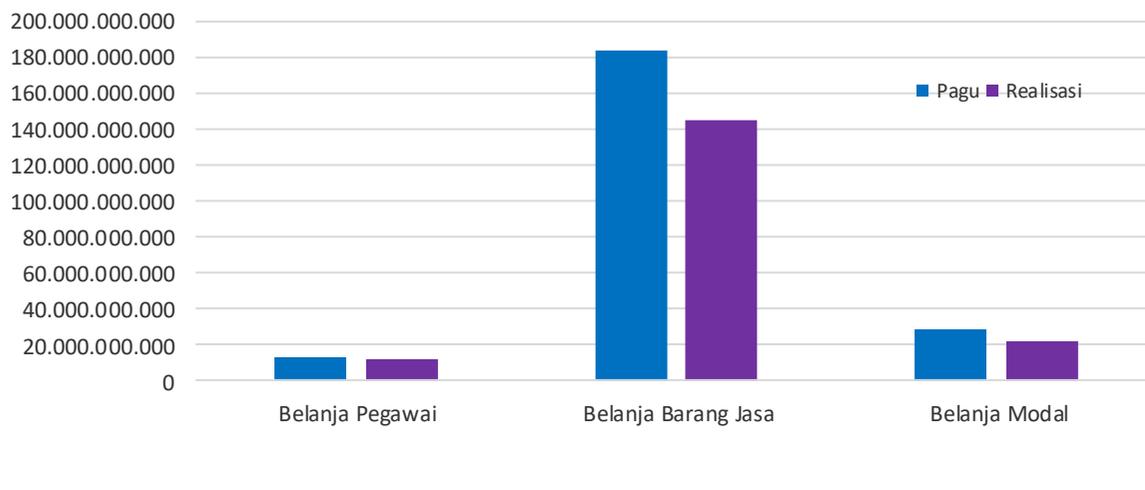


Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagian besar adalah Belanja Langsung Rp. 226.235.636.446,- (73,12%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 83.165.840.653,- (26,88%).

## BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN TAHUN 2020



## REALISASI BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN TAHUN 2020



Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagian besar adalah Belanja Barang Jasa sebesar Rp 183.966.245.716,- (81,31%) kemudian Belanja Modal sebesar Rp. 28.733.411.730,- (12,70%) dan Belanja Pegawai senilai Rp. 13.535.979.000,- (5,98%). Sedangkan realisasi anggaran Belanja Barang Jasa sebesar Rp 145.611.231.087,- kemudian Belanja Modal sebesar Rp. 21.527.071.332,- dan Belanja Pegawai senilai Rp. 12.048.639.092,- .

Tabel 5.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
1	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	0,22 %	0,23 %	100	16.923.106.360	7.834.639.980	46,29
		Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	100%	81%	81%	150.000.000	48.789.800	32,53
		Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	100%	96,74%	96,74%	225.000.000	208.719.550	92,76
		Jaminan Persalinan	300 ibu bersalin	145 ibu bersalin	48,33%	1.999.629.000	922.469.100	46,13
		Bantuan Operasional Kesehatan	100%	100%	100%	6.682.474.000	2.678.514.375	40,08
		Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	100%	65,68%	65,68%	225.000.000	214.845.400	95,49
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	100%	76%	76%	900.000.000	661.498.500	73,50
		Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	100%	94,72%	94,72%	600.000.000	294.292.650	49,05
		Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	100%	76,57%	76,57%	300.000.000	297.370.200	99,12
		Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	100%	45,03%	45,03%	200.000.000	193.545.600	96,77
		Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	40%	40%	43.593.750	37.936.753	87,02

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Pengembangan Taman Posyandu	526 taman posyandu	0	17,13	125.000.000	21.408.250	17,13
		Penyediaan IPAL	3 unit	0	5,05%	603.327.000	30.488.250	5,05
		Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)	30%	62,90%	62,90%	121.029.000	86.844.500	71,76
		Pengadaan alat penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	17 unit	0	0	1.933.625.000	1.689.600.000	87,38
		Pengadaan alat penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (BU dan Pendamping)	17 unit	0	0	30.646.150	17.479.250	57,04
		Biaya Umum Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	12 bulan	12 bulan	100%	294.895.000	273.745.000	92,83
		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100%	82%	82%	961.377.760	783.984.600	81,55
		Peningkatan Imunisasi	98%	96,71%	96,71%	205.000.000	128.830.850	62,84
		Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	100%	100%	100%	246.947.100	127.608.812	51,67
		Pelayanan Pencegahan	100%	66,72%	66,72%	940.562.600	445.480.590	47,36

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa						
		Pelayanan Kesehatan Matra	400 Orang	407 orang	100%	60.000.000	26.822.500	44,70
		Peningkatan Peran KPAD	100%	100%	100%	75.000.000	58.201.450	77,60
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	77 Indeks	90,39 %	100	207.994.389.086	136.350.949.165	65,55
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6 jenis	7 jenis	100%	68.790.950	36.190.950	52,61
		Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	25 jenis	24 jenis	96%	3.000.000.000	2.806.187.361	93,54
		Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	100%	46,75%	46,75%	60.000.000	44.600.550	74,33
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	12 bulan	12 bulan	100%	120.000.000	100.284.215	83,57
		Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)	654 orang	654 orang	100%	3.737.142.000	2.609.233.987	69,82

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	654 orang	654 orang	100%	1.071.940.000	772.299.895	72,05
		Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	19 UPTD	19 UPTD	100%	1.207.080.000	1.099.074.295	91,05
		Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	100%	68,27%	68,27%	61.852.100	42.688.750	69,02
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	9 kali	0	0	-	-	-
		Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	9 Tenaga Kesehatan	8 Tenaga Kesehatan	88,89%	10.662.000	2.010.000	18,85
		Pengelolaan Obat E-Logistik	12 bulan	12 bulan	100%	98.834.000	92.872.600	93,97
		Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	2 jenis	2 jenis	100%	716.400.000	655.681.390	91,52
		Pengadaan Alat Kesehatan (BU dan Pendamping DAK)	2 jenis	1 jenis	48,80%	25.000.000	12.200.000	48,80
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	6 jenis	11 jenis	100%	3.785.802.000	3.045.810.360	80,45
		Pengawasan Pangan (DAK Non-Fisik)	100%	40%	40%	191.776.000	71.177.250	37,11
		Pengadaan Alat Kesehatan (DID Tambahan)	5 unit	5 unit	100%	1.000.000.000	926.065.800	92,61
		Pelayanan Kesehatan Primer	100%	100%	100%	192.211.150	147.536.550	76,76
		Akreditasi Puskesmas	0	0	0	28.112.000	-	0

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	8 puskesmas	0	0	914.564.000	56.031.710	6,13
		Pelayanan Kesehatan Rujukan	22 sarana	12 sarana	54,55%	50.000.000	27.470.700	54,94
		Pelayanan Kesehatan Tradisional	230 orang	61 orang	26,52%	37.502.700	29.317.300	78,17
		Pengamanan Kesehatan (PAM)	97 kegiatan	83 kegiatan	85,57%	275.000.000	216.969.491	78,90
		Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	109 orang	109 orang	100%	3.245.321.150	3.173.929.800	97,80
		Pelayanan Public Safety Center (PSC)	396 korban	106 korban	26,77%	500.000.000	351.480.577	70,30
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	1350 pemeriksaan	2410 pemeriksaan	100%	125.000.000	117.200.650	93,76
		Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP				1.897.787.401	1.545.435.600	81,43
		Penyediaan /	1 unit	1 unit	79,62%	2.000.000.000	1.592.349.267	79,62

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL						
		Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP	11 jenis	15 jenis	100%	2.980.000.000	2.880.827.782	96,67
		Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas	11 jenis	22 jenis	100%	7.778.985.302	4.295.900.006	55,22

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Kesehatan yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP						
		Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	48.000 jiwa	38.557 jiwa	100%	5.000.000.000	2.585.733.173	85,80
		Kemitraan auransi kesehatan masyarakat (Pajak Rokok)	48.000 jiwa	38.557 jiwa	100%	12.000.000.000	12.000.000.000	100
		Pembangunan Puskesmas Pembantu	0	0	0	828.350	828.350	100
		Pengadaan Puskesmas Keliling	1 unit	1 unit	100%	1.600.000.000	1.219.516.700	76,22
		Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	4 unit	0	0	250.000.000	980.350	0,39
		Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK)	1 unit	1 unit	100%	353.322.000	304.920.000	86,30
		Pengadaan Puskesmas Keliling (BU dan Pendamping DAK)	1 unit	0	0	8.000.000	4.950.000	61,88
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	12 bulan	12 bulan	100%	101.158.320.993	87.924.344.005	86,92

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Pembangunan Rumah Sakit	1 unit	53,81%	53,81%	1.000.000.000	538.103.600	53,81
		Pengembangan Ruang Operasi (DID Tambahan)				2.200.000.000	1.368.830.582	62,22
		Biaya Pendamping Pengembangan Ruang Operasi DID				17.350.000	9.075.000	52,31
		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	75%	94,97%	100%	1.600.681.803	1.493.703.437	93,32
		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)	75%	91,85%	100%	3.317.505.211	2.970.160.546	89,53
		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)	75%	90,61%	100%	1.921.525.137	1.805.152.590	93,94
		Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	75%	97,18%	100%	1.774.381.579	1.654.469.531	93,24
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	12 bulan	12 bulan	100%	162.000.000	142.383.139	87,89
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	12 bulan	12 bulan	100%	144.000.000	128.239.284	89,06
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	100%	172.500.000	159.100.782	92,23

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Puskesmas Plaosan						
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	12 bulan	12 bulan	100%	137.000.000	127.697.825	93,21
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	12 bulan	12 bulan	100%	147.000.000	138.043.712	93,91
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	12 bulan	12 bulan	100%	173.500.000	135.294.630	77,98
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	12 bulan	12 bulan	100%	161.500.000	151.059.982	93,54
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan	12 bulan	12 bulan	100%	166.500.000	162.201.359	97,42
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	12 bulan	12 bulan	100%	165.100.000	151.954.102	92,04
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-	12 bulan	12 bulan	100%	164.500.000	154.475.835	93,91

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Gareng Taji						
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	12 bulan	12 bulan	100%	179.400.000	167.864.366	93,57
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	12 bulan	12 bulan	100%	173.000.000	150.196.186	86,82
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	12 bulan	12 bulan	100%	160.000.000	146.314.351	91,45
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	12 bulan	12 bulan	100%	148.800.000	114.183.622	76,74
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	12 bulan	12 bulan	100%	138.700.000	131.517.262	94,82
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	12 bulan	12 bulan	100%	179.000.000	155.720.884	86,99
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	12 bulan	12 bulan	100%	169.500.000	150.565.080	88,83

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	12 bulan	12 bulan	100%	144.000.000	108.160.850	75,11
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	12 bulan	12 bulan	100%	600.000.000	361.894.450	60,32
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	12 bulan	12 bulan	100%	845.000.000	574.522.200	67,99
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	12 bulan	12 bulan	100%	875.000.000	500.777.800	57,23
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	12 bulan	12 bulan	100%	520.000.000	360.405.000	69,31
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	12 bulan	12 bulan	100%	540.000.000	403.967.300	74,81
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	12 bulan	12 bulan	100%	390.000.000	271.185.502	69,53
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	12 bulan	12 bulan	100%	525.000.000	411.836.600	78,45
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	12 bulan	12 bulan	100%	650.000.000	424.225.000	65,27
			12 bulan	12 bulan	100%			

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	12 bulan	12 bulan	100%	470.000.000	328.817.700	69,96
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	12 bulan	12 bulan	100%	383.543.000	293.835.310	76,61
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan	12 bulan	12 bulan	100%	640.000.000	426.163.250	66,59
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran	12 bulan	12 bulan	100%	650.000.000	408.906.500	62,91
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	12 bulan	12 bulan	100%	500.000.000	352.589.700	70,52
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	12 bulan	12 bulan	100%	775.000.000	568.661.575	73,38
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	12 bulan	12 bulan	100%	475.000.000	351.692.900	74,04
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	12 bulan	12 bulan	100%	385.000.000	313.544.739	81,44
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	12 bulan	12 bulan	100%	400.000.000	296.847.920	74,21

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	12 bulan	12 bulan	100%	500.000.000	286.717.200	57,34
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	12 bulan	12 bulan	100%	545.000.000	384.831.000	70,61
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	12 bulan	12 bulan	100%	525.000.000	392.535.410	74,77
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	12 bulan	12 bulan	100%	630.000.000	362.251.100	57,50
		Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	12 bulan	12 bulan	100%	425.000.000	246.461.100	57,99
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	12 bulan	12 bulan	100%	1.431.284.128	1.074.358.210	75,06
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	12 bulan	12 bulan	100%	1.117.792.031	846.883.010	75,76
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan	12 bulan	12 bulan	100%	1.529.482.357	1.241.952.910	81,20

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	12 bulan	12 bulan	100%	547.583.495	510.108.275	93,16
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol	12 bulan	12 bulan	100%	1.371.903.003	1.096.447.569	79,92
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	12 bulan	12 bulan	100%	2.514.921.742	1.875.651.415	74,58
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	12 bulan	12 bulan	100%	1.240.896.052	965.086.478	77,77
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	12 bulan	12 bulan	100%	1.965.075.951	1.327.585.825	67,56
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	12 bulan	12 bulan	100%	1.627.145.478	928.091.328	57,04
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	12 bulan	12 bulan	100%	776.434.462	674.768.307	86,91

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	12 bulan	12 bulan	100%	1.976.622.424	1.093.632.895	55,33
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	12 bulan	12 bulan	100%	1.278.676.040	1.019.298.746	79,72
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung	12 bulan	12 bulan	100%	576.280.103	547.267.061	94,97
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	12 bulan	12 bulan	100%	1.005.970.674	584.503.375	58,10
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo	12 bulan	12 bulan	100%	1.313.268.739	916.743.739	69,81
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	12 bulan	12 bulan	100%	1.602.084.039	1.395.970.206	87,13
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro	12 bulan	12 bulan	100%	1.214.931.639	1.139.870.979	93,82
			12 bulan	12 bulan	100%			

No	Sasaran	Inikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo	12 bulan	12 bulan	100%	548.925.065	369.051.580	67,23

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sudah mencapai target dan Indikator Kinerja Prioritas Dinas Kesehatan diantaranya Angka Kematian Ibu sudah mencapai target dengan capaian 100 %,Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting sudah tercapai yaitu sebesar 100%, sedangkan dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai target sebanyak 6 indikator. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dan keuangan tahun 2020 sudah efektif dan efisien secara keseluruhan.

Indikator Kinerja Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan diantaranya Angka Kematian Ibu sudah mencapai target 100%, namun masih adanya kematian ibu di Kabupaten Magetan disebabkan oleh penyebab langsung perdarahan 50%, Pre-eklampsia dan Eklampsia sebesar 16,6%. Meskipun AKI dapat diturunkan namun akibat pandemi covid-19 terjadi permasalahan baik ditingkat fasilitas pelayanan dasar dan rujukan. Permasalahan di tingkat dasar kurangnya pemantauan ibu hamil akibat pembatasan layanan (physical distancing), terbatasnya APD saat awal pandemi serta beralihnya peran petugas dalam penanganan covid-19, Selain itu permasalahan di tingkat rujukan disebabkan kapasitas ruang isolasi covid untuk maternal terbatas dan belum tersedianya ruang operasi khusus covid yang mengakibatkan jika harus dipaksa di OK biasa akan mengganggu operasi yang lainnya sehingga pemerintah kabupaten Magetan memutuskan swab ibu wajib menjelang persalinan. Tujuan pemeriksaan swab RT PCR adalah untuk mendapatkan tatalaksana pada ibu bersalin dengan swab positif dan negatif sampai dengan bersalin hamil dan berdiam dirumah untuk mengurangi risiko terpapar covid-19. Selain Terbatasnya ruang isolasi di RS rujukan Covid juga menjadi kendala sehingga ibu bersalin terlambat mendapatkan pertolongan persalinan. Meskipun demikian, pada tahun 2020 tidak terdapat kematian ibu yang disebabkan covid – 19 di Kabupaten Magetan.

Angka Kematian Bayi (AKB) 9,71/1000 KH, Tahun 2020 AKB di Kabupaten mengalami penurunan dengan jumlah kasus kematian bayi sejumlah 73, lahir hidup 8174, Angka Kematian Bayi (AKB) 8,93/1000 KH. Target AKB tahun 2020 adalah kurang dari 23/1000 KH. Hal ini menunjukkan bahwa AKB tahun 2020 Kabupaten Magetan sudah sesuai target karena dibawah 23/1000 KH. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun.

Kasus kematian tertinggi di Kabupaten Magetan tahun 2020 disebabkan oleh BBLR yaitu 27 kasus, selanjutnya disebabkan kelainan bawaan 23 kasus, dan penyebab ketiga terbanyak adalah asfiksia sejumlah 10 kasus.

Berdasarkan hasil pengukuran Bulan Timbang Tahun 2020, prevalensi balita stunting mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketrampilan kader dalam mempergunakan alat anthropometri dan melakukan pengukuran sesuai standar, serta semakin banyaknya posyandu yang memiliki alat anthropometri sesuai standar, yang antara lain dipenuhi dari dana desa.



# BAB IV

# PENUTUP

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis dan ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Prioritas dikategorikan tercapai target. Sedangkan dari 12 (dua belas) indikator SPM Bidang Kesehatan baru mencapai target sebanyak 6 indikator Hasil tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap indikator-indikator yang tidak tercapai target pada tahun berikutnya.

Pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 khususnya untuk tahun anggaran 2020 secara umum dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Namun, untuk beberapa indikator yang belum tercapai target menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan menjadi motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang.



**LAMPIRAN I**  
**MATRIKS**  
**RENSTRA**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DINAS KESEHATAN  
2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	-2 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	-3 1.1.1	-4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-5 Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Prevalensi Balita Stunting; Cakupan Rumah Tangga Sehat; Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM II per 100.000 kelahiran hidup; per 1000 kelahiran hidup; %; %; %	-6 158,07;1 0,07;30,2 3,00;30,0 0,62,00;2 0,62,00;3 7,45 8,09	-7 102,00;2	-8 7.017.000.000	-9 102,00;2	-10 7.892.000.000	-11 100,00;2	-12 8.225.000.000	-13 98,00;19,00;28,50;64,00;9,37	-14 8.335.000.000	-15 98,00;18,00;28,00;65,00;9,37	-16 6.810.000.000	-17 98,00;18,00;28,00;65,00;74,90	-18 38.279.000.000

1.1.1.1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar, Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar, Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar, Cakupan KB Aktif II %,%,%,%,%	96,00;98,16;100,00;96,99;79,00	100,00;100,00;100,00;79,00	700.000.000	100,00;100,00;100,00;80,00	700.000.000	100,00;100,00;100,00;80,00	700.000.000	100,00;100,00;100,00;80,00	3.500.000.000
1.1.1.2	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Cakupan Pelayanan Lanjut Usia ;Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar II %,%	88,53;99,94	100,00;100,00	400.000.000	100,00;100,00	450.000.000	100,00;100,00	500.000.000	100,00;100,00	2.350.000.000
1.1.1.3	Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S), Cakupan ASI Eksklusif, Cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT, Cakupan TTD Remaja Putri II	87,00;63,90;89,70;79,00	88,00;64,00;89,80;80,00	600.000.000	89,00;64,10;89,90;81,00	800.000.000	90,00;64,20;90,00;82,00	1.100.000.000	92,00;64,40;90,20;84,00	4.700.000.000

1.1.1.4	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif; Cakupan Posyandu PURI; Cakupan UKBM yang dibina    %,-%;-%	100,00;7 4,00;85,0 0	100,00;7 4,00;90,0 0	660.000.000 100,00;7 5,00;91,0 0	670.000.000 100,00;7 5,00;91,0 0	680.000.000 100,00;7 6,00;92,0 0	700.000.000 100,00;7 6,00;92,0 0	3.210.000.000
1.1.1.5	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK terbentuk; Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal; Perse ntase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah; Perse ntase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji; Persentas e Kelompok/ Klub Olahraga    Pos UKK; Pos UKK; %,-%;-%	35,00;22,00;30,00;80,00;35,00 22,00;22,00;30,00;80,00;35,00 00	500.000.000 5,00;57,0 0;30,00;8 5,00;35,0 0	500.000.000 5,00;62,0 0;32,00;8 6,00;35,0 0	520.000.000 5,00;67,0 0;34,00;8 8,00;35,0 0	520.000.000 5,00;72,0 0;34,00;9 0,00;35,0 0	530.000.000 77,00;72,00;34,00;90,00;35,00	2.570.000.000
1.1.1.6	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Cakupan PHBS; Cakupan Pendataan Keluarga Sehat; Cakupan Tatanan Sehat    %,-%;-%	62,00;10,00;62,00 0,00;62,00 0	800.000.000 62,00;10,00;63,0 0	990.000.000 63,00;10,00;63,0 0	1.000.000.000 64,00;10,00;63,0 0	1.000.000.000 64,00;10,00;64,0 0	1.000.000.000 64,00;10,00;64,0 0	4.790.000.000

1.1.1.7	Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	Verifikasi desa/kelurahan dalam STBM tingkat Kabupaten; Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan II	22,00;80,00	80,00;88,00	500.000.000,00	22,00;89,00	510.000.000,00	22,00;90,00	520.000.000,00	168,00;90,00	2.540.000.000,00
1.1.1.8	Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen; Persentase Rumah Sehat; Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas; Persentase TPM memenuhi syarat II	90,00;75,00;100,00;86,00	90,00;75,00;100,00;86,00	517.000.000,00	91,00;76,00;100,00;86,00	550.000.000,00	92,00;78,00;100,00;86,00	550.000.000,00	92,00;78,00;100,00;86,00	2.684.000.000,00
1.1.1.9	Pengembangan Taman Posyandu	Pendampingan Taman Posyandu II	526	526	0	526	0	526	0	526	0
1.1.1.10	Penyediaan IPAL	Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas II	5	5	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	11.935.000.000,00
1.1.1.11	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan II	12	12	0	12	0	12	0	60	0



1.1.2.1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Angka Bebas Jentik;Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan;Penemuan kasus Pneumonia Balita;Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus;RFT Rate Kusta II %; %; %; %; %; %	95,00;100,00;100,00;5,00	95,00;100,00;90,00;100,00	1.840.000.000	95,00;100,00;90,00;100,00	1.876.000.000	95,00;100,00;92,00;100,00	1.923.000.000	95,00;100,00;92,00;100,00	1.971.000.000	95,00;100,00;94,00;100,00	1.955.000.000	95,00;100,00;94,00;100,00	9.565.000.000
1.1.2.2	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah C-JH yang mendapat pelayanan kesehatan II Oratio	356	350	100.000.000	400	110.000.000	400	125.000.000	420	135.000.000	450	150.000.000	2020	620.000.000
1.1.2.3	Peningkatan Imunitasi	Cakupan bayi yang mendapatkan Imunitasi Dasar lengkap;Cakupan BIAS II %; %	92,00;100,00	93,00;100,00	300.000.000	93,50;100,00	330.000.000	94,00;100,00	300.000.000	94,50;100,00	300.000.000	95,00;100,00	300.000.000	95,00;100,00	1.530.000.000



1.1.2.7	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu; Perse ntase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA); Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Perse ntase kasus Pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	78,00;25,00;87,06;100,00	100,00;30,00;100,00	1.570.000.000	100,00;40,00;100,00	1.601.500.000	100,00;50,00;100,00	1.633.500.000	100,00;60,00;100,00	1.666.000.000	100,00;70,00;100,00	1.699.500.000	100,00;70,00;100,00	8.170.500.000
1.1.2.8	Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1.1.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar; Perse ntase penyehat tradisional yang memiliki STPT    %; %	95,50;20,00	97,70;20,00	3.280.000.000	97,70;20,00	3.635.000.000	97,70;21,00	3.040.000.000	97,70;21,00	3.345.000.000	100,00;22,00	3.225.000.000	100,00;22,00	16.525.000.000

1.1.3.1	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar, Jumlah workshop/ bimtek/ sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer    Puskesmas: kegiatan	22,00;4,0 0	22,00;9,0 0	400.000.000 22,00;9,0 0	450.000.000 22,00;9,0 0	500.000.000 22,00;9,0 0	550.000.000 22,00;9,0 0	600.000.000 22,00;45,00	2.500.000.000
1.1.3.2	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Persehat Tradisional yang dbina    Orang	200	200	75.000.000 230	80.000.000 260	85.000.000 290	90.000.000 320	95.000.000 320	425.000.000
1.1.3.3	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi    Puskesmas	6	8	600.000.000 8	850.000.000 6	650.000.000 8	850.000.000 6	650.000.000 6	3.600.000.000
1.1.3.4	Pengamanan Kesehatan (PAM)	Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental    kegiatan	97	97	200.000.000 97	200.000.000 97	200.000.000 97	200.000.000 97	200.000.000 485	1.000.000.000
1.1.3.5	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor    Orang	109	109	800.000.000 109	800.000.000 109	825.000.000 109	850.000.000 109	850.000.000 109	4.125.000.000



1.1.4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	<p>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik; Perse ntase kecukupan alat kesehatan sesuai standar; Perse ntase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar; Perse ntase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar; Pers entase Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABAR)</p> <p>Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan    Jenis.</p> <p>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian    %</p>	100,00;7 0,00;90,0 0,80;00,8 2,50	100,00;7 5,00;100, 00;80,00; 82,50	10.216.956.000	100,00;7 8,00;100, 00;85,00; 85,00	8.463.755.000	100,00;8 1,00;100, 00;90,00; 85,00	8.748.777.000	100,00;8 5,00;100, 00;95,00; 85,00	9.172.665.000	100,00;8 5,00;100, 00;95,00; 85,00	61.829.506.000
1.1.4.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
1.1.4.2	Biaya Umum dan Pendamping an DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian		100	100	0	0	0	100	0	100	0	100	0



1.1.4.7	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat, Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT, Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat, Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna)    Ritel Ritel/Apot	390,00;100,00;79,00;134,000	390,00;90,00;40,00;134,00	240.000.000	390,00;90,00;40,00;134,00	250.000.000	390,00;90,00;40,00;134,00	250.000.000	250.000.000	390,00;90,00;40,00;134,00	250.000.000	1.240.000.000
1.1.4.8	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)	Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS    Orang	654	654	2.821.353.000	654	2.525.000.000	654	2.515.752.000	2.605.510.000	654	13.017.865.000	
1.1.4.9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK    Bulan	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	140.000.000	140.000.000	12	630.000.000	

1.1.4.10	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan; Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan; Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN II SK; Orang; SK	250,00;1 250,00;1 80,00	250,00;1 315,00;1 80,00	200.000.000	250,00;1 612,00;1 85,00	250.000.000	250,00;1 820,00;1 85,00	280.000.000	250,00;1 910,00;1 85,00	295.000.000	250,00;2 025,00;1 85,00	310.000.000	1250,00; 2025,00; 920,00	1.335.000.000
1.1.4.11	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan II kali	5	7	175.000.000	250,00;1 192,500.000	250.000.000	250,00;1 12	225.000.000	250,00;1 12	250.000.000	250,00;1 12	285.000.000	52	1.127.500.000
1.1.4.12	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten II Tenaga Kesehatan	9	9	75.000.000	100.000.000	100.000.000	250,00;1 9	125.000.000	250,00;1 9	135.000.000	250,00;1 9	150.000.000	9	585.000.000
1.1.4.13	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN II Jiwa	48000	48000	9.100.000.000	0	0	250,00;1 0	0	250,00;1 0	0	250,00;1 0	0	48000	9.100.000.000
1.1.4.14	Pengelolaan Obat E-Logistik	Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E-Logistik II Bulan	12	12	0	0	0	250,00;1 12	0	250,00;1 12	0	250,00;1 12	0	60	0
1.1.5	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Pencapaian SPM RSUD II %	80	80	63.000.000.000	77.000.000.000	77.000.000.000	250,00;1 82	79.000.000.000	250,00;1 84	80.000.000.000	250,00;1 85	82.000.000.000	85	381.000.000.000

1.1.5.1	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan II	Persentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan II %	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.5.2	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD II Bulan	12	12	63.000.000.000	12	77.000.000.000	12	79.000.000.000	12	80.000.000.000	12	82.000.000.000	12	88.000.000.000	12	381.000.000.000
1.1.5.3	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit II Paket	4	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
1.1.5.4	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	Jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung Rumah Sakit II unit	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1.1.5.5	Pengadaan Ambulan/Mobil Jenazah	Jumlah pengadaan ambulance/mobil jenazah II unit	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1.1.5.6	Pengadaan IPAL	Jumlah pembangunan IPAL II unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1.1.5.7	Pembangunan IPAL	Jumlah alat pengolah limbah padat II unit	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0



1.1.6.6	Pengadaan meubeleur rumah sakit	Jumlah pengadaan Meubeler Rumah Sakit II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.000	1	5.000.000.000	1	15.000.000.000	
1.1.6.7	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	
1.1.6.8	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000.000	1	10.000.000.000	1	25.000.000.000	
1.1.6.9	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat Rumah Sakit II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	500.000.000	1	1.500.000.000	
1.1.7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar; Perse ntase Pustu dalam kondisi baik; Persentase Ambulans dan Pusing dalam kondisi baik    %, %, %	66,00;71,00;75,00	67,30;78,00;82,00	73,20;85,00;91,00	78,00.000.000	83,20;89,80;100,00	7.150.000.000	89,00;95,00;100,00	5.050.000.000	100,00;100,00;100,00	3	750.000.000	3	750.000.000	17	4.250.000.000
1.1.7.1	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah rehabilitasi puskesmas pembantu II	0	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	17	4.250.000.000
1.1.7.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah rehabilitasi puskesmas II	1	1	2.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	9	18.000.000.000

1.1.7.3	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar II %	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1.1.7.4	Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling II unit	7	4	1.600.000.000	4	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	16	4.800.000.000
1.1.7.5	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Jumlah rehabilitasi/pembangunan sedang/berat dan puskesmas II unit	2	4	0	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	15	0
1.1.7.6	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu II unit	0	0	700.000.000	1	700.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000
1.1.7.7	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis II unit	0	0	500.000.000	2	500.000.000	1	500.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	6	1.600.000.000
1.1.8	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian SPM Kesehatan II %	80	80	26.988.997.000	81	26.529.670.000	84	26.867.098.000	85	27.171.224.000	85	27.490.240.000	85	27.490.240.000	85	135.047.229.000
1.1.8.1	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) II %	70	75	1.750.000.000	76	1.721.250.000	78	1.742.765.000	80	1.764.549.000	80	1.786.605.000	80	1.786.605.000	80	8.765.169.000





1.1.8.13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Garing Tajji	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	64.400.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	394.400.000
1.1.8.14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	63.400.000	12	72.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	390.400.000
1.1.8.15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karoharjo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	54.500.000	12	73.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	382.500.000
1.1.8.16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	54.400.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	384.400.000
1.1.8.17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembayan	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	59.100.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	384.100.000

				12	12	87.200.000	12	88.000.000	12	88.000.000	12	92.000.000	12	95.000.000	60	450.200.000
1.1.8.18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Maospati	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12												
1.1.8.19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Taji	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	58.100.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	383.100.000	
1.1.8.20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	71.100.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	401.100.000	
1.1.8.21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya II Bulan	12	12	51.800.000	12	75.000.000	12	82.500.000	12	88.000.000	12	92.500.000	60	389.800.000	
1.1.8.22	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	12	1.228.430.400	12	1.177.457.000	12	1.183.345.000	12	1.189.261.000	12	1.195.207.000	60	5.973.700.400	

1.1.8.23	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	438.478.100	12	420.284.000	12	422.385.000	12	424.497.000	12	426.619.000	60	2.132.263.100
1.1.8.24	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	1.585.190.100	12	1.539.413.000	12	1.547.010.000	12	1.554.645.000	12	1.562.318.000	60	7.788.576.100
1.1.8.25	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngunjung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	69.560.000	12	75.000.000	12	82.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	60	406.560.000
1.1.8.26	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	752.533.900	12	721.308.000	12	724.915.000	12	728.539.000	12	732.181.000	60	3.659.476.900
1.1.8.27	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tlidan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	737.239.400	12	706.648.000	12	710.181.000	12	713.732.000	12	717.300.000	60	3.585.100.400

1.1.8.28	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	1.195.071.900	12	1.145.483.000	12	1.151.210.000	12	1.156.967.000	12	1.162.754.000	60	5.811.485.900
1.1.8.29	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Garang Taji	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	535.061.100	12	512.859.000	12	515.423.000	12	518.000.000	12	520.590.000	60	2.601.933.100
1.1.8.30	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Pencil	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	791.801.400	12	758.946.000	12	762.740.000	12	766.554.000	12	770.387.000	60	3.850.428.400
1.1.8.31	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	1.355.732.400	12	1.299.477.000	12	1.305.974.000	12	1.312.505.000	12	1.319.066.000	60	6.592.754.400
1.1.8.32	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Piaosan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	1.176.531.400	12	1.127.712.000	12	1.133.350.000	12	1.139.017.000	12	1.144.712.000	60	5.721.322.400

1.1.8.33	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	12	500.251.200	12	479.493.000	12	481.892.000	12	484.300.000	12	486.722.000	60	2.432.658.200
1.1.8.34	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	12	1.527.780.100	12	1.444.385.000	12	1.451.707.000	12	1.459.065.000	12	1.486.460.000	60	7.369.397.100
1.1.8.35	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembayan	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	12	1.187.918.500	12	1.138.626.000	12	1.144.319.000	12	1.150.041.000	12	1.155.792.000	60	5.776.696.500
1.1.8.36	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoarjo	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	12	779.670.500	12	747.318.000	12	751.055.000	12	754.810.000	12	758.584.000	60	3.791.437.500
1.1.8.37	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas II Bulan	12	12	785.537.300	12	752.942.000	12	756.706.000	12	760.489.000	12	764.292.000	60	3.819.966.300









	1.1.9.2	Peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP	Jumlah pengadaan / alat kesehatan di FKTP II Jenis	11	11	1.600.000.000	11	1.500.000.000	11	1.600.000.000	11	2.450.000.000	11	2.000.000.000	11	9.150.000.000
	1.1.9.3	Peningkatan/ pemeliharaan/ sarana/prasa rehabilitasi/ kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP	Jumlah pembangunan / penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP II unit	0	8	3.500.000.000	2	600.000.000	1	500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	19	8.600.000.000





Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya a penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	2.1.1	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin yang terdaftar peserta JKN oleh Pemerintah Daerah II %	0	0	0	100	14.100.000.000	100	13.100.000.000	100	12.600.000.000	100	54.900.000.000
		2.1.1.1	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN; Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS II Jiwa; Orang	0	0	0	48000,00	6.000.000.000	48000,00	4.000.000.000	48000,00	3.500.000.000	48000,00	18.500.000.000
		2.1.1.2	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok)	Jumlah penduduk diberi bantuan luran Premi JKN II Jiwa	0	0	48000	9.100.000.000	9.100.000.000	48000	9.100.000.000	48000	9.100.000.000	48000	36.400.000.000
Meningkatnya a kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan masyarakat II Indeks	75	75	1.080.000.000	76	1.400.000.000	76	1.650.000.000	77	1.700.000.000	77	7.380.000.000
		1.1.1.1	Pelayanan Perijinan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perijinan dinas II Bulan Daerah	12	12	200.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	1.550.000.000
		1.1.1.2	Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran II Bulan	12	12	800.000.000	12	1.000.000.000	12	1.200.000.000	12	1.250.000.000	60	5.350.000.000



				0	46	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	50	130.000.000	50	140.000.000	246	600.000.000
	3.1.3.2	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan    Orang													
	4.1.4	<b>Program Peningkatan Perencanaan n, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu    %	100	100	235.000.000	100	245.000.000	100	255.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	1.255.000.000
	4.1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu    Dokumen	7	10	135.000.000	10	135.000.000	10	135.000.000	10	135.000.000	10	135.000.000	10	675.000.000
	4.1.4.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun    Dokumen	3	3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	580.000.000
	<b>Total</b>				<b>143.323.350.000</b>		<b>163.271.126.000</b>		<b>192.132.353.000</b>		<b>198.907.001.000</b>		<b>191.057.405.000</b>		<b>888.691.235.000</b>	

**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN**  
**KINERJA 2020**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Persentase Keluarga Sehat	0,22 %
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Indeks

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 1.047.000.000</b>	
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 787.000.000	DBH Pusat
2 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp. 180.000.000	DBH Pusat
3 Survey Kepuasan Masyarakat	Rp. 80.000.000	DBH Pusat
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 389.750.000</b>	
1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 186.000.000	DBH Pusat
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp. 92.750.000	DBH Pusat
3 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp. 60.000.000	DBH Pusat
4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 51.000.000	DBH Pusat
<b>3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 75.000.000</b>	
1 Pendidikan dan Pelatihan formal	Rp. 35.000.000	DBH Pusat
2 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan	Rp. 40.000.000	DBH Pusat
<b>4 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 185.000.000</b>	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 110.000.000	DBH Pusat
2 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Rp. 75.000.000	DBH Pusat

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>5</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Rp</b>	<b>10.081.603.000</b>	
1	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Rp.	150.000.000	DBH Pusat
2	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Rp.	225.000.000	DBH Pusat
3	Jaminan Persalinan	Rp	1.999.629.000	DBH Pusat
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp	1.222.474.000	DAK Non Fisik
5	Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp.	225.000.000	DBH Pusat
6	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp.	900.000.000	DBH Pajak Rokok
7	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Rp.	600.000.000	DBH Pajak Rokok
8	Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	Rp.	300.000.000	DBH Pusat
9	Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	Rp.	200.000.000	DBH Pusat
10	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.	200.000.000	DBH Pusat
11	Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Rp.	1.775.000.000	DAU
12	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	Rp.	1.933.625.000	DAK
13	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (BU dan Pendamping DAK)	Rp.	40.000.000	DBH Pusat
14	Biaya Umum Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Rp.	310.875.000	DBH Pusat
<b>6</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>4.108.264.000</b>	
1	Pelayanan Kesehatan Primer	Rp.	280.000.000	DBH Pusat
2	Akreditasi Puskesmas	Rp.	600.000.000	DBH Pusat
3	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Rp.	914.564.000	DAK Non Fisik
4	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	125.000.000	DBH Pusat
5	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Rp.	75.000.000	DBH Pusat
6	Pengamanan Kesehatan (PAM)	Rp.	200.000.000	DBH Pusat
7	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Rp.	788.700.000	DBH Pusat

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
8	Pelayanan Public Safety Center (PSC)	Rp.	1.000.000.000	DBH Pusat
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Rp.	125.000.000	DBH Pusat
<b>7</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	<b>Rp</b>	<b>3.911.322.000</b>	
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Rp.	700.000.000	DAU
2	Pengadaan Puskesmas Keliling	Rp.	1.600.000.000	DAU
3	Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas pembantu	Rp.	1.000.000.000	DAU
4	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	Rp.	250.000.000	DAU
5	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK)	Rp.	353.322.000	DAK Fisik
6	Pengadaan Puskesmas Keliling (BU dan Pendamping DAK)	Rp.	8.000.000	DBH Pusat
<b>8</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	<b>Rp</b>	<b>1.000.000.000</b>	
1	Pembangunan Rumah Sakit	Rp.	1.000.000.000	DAU
<b>9</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>17.000.000.000</b>	
1	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	Rp	5.000.000.000	DID
2	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Rp	12.000.000.000	DBH Pajak Rokok
<b>10</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>7.000.000.000</b>	
1	Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Rp.	200.000.000	DBHCHT

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
2	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan / penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan / gedung/ ruang pelayanan kesehatan di FKTL	Rp.	2.000.000.000	DBHCHT
3	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP	Rp.	1.800.000.000	DBHCHT
4	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP	Rp.	3.000.000.000	DBHCHT
<b>11</b>	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>Rp</b>	<b>2.488.887.460</b>	
1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Rp.	981.877.760	DBH Pusat
2	Peningkatan Imunisasi	Rp.	230.000.000	DBH Pusat
3	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Rp.	120.000.000	DBH Pusat
4	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Rp.	972.009.700	DBH Pusat
5	Pelayanan Kesehatan Matra	Rp.	110.000.000	DBH Pusat
6	Peningkatan Peran KPAD	Rp.	75.000.000	DBH Pusat
<b>12</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Perorangan</b>	<b>Rp</b>	<b>90.000.000.000</b>	
1	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	Rp	90.000.000.000	PAD

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>13</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>41.961.253.000</b>	
1	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)	Rp	2.025.000.000	PAD
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Rp	1.750.000.000	PAD
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)	Rp	3.280.905.000	PAD
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	Rp	1.570.805.000	PAD
5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	Rp.	162.000.000	DBH Pusat
6	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	Rp.	144.000.000	DBH Pusat
7	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	Rp.	172.500.000	DBH Pusat
8	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	Rp.	137.000.000	DBH Pusat
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	Rp.	147.000.000	DBH Pusat
10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	Rp.	173.500.000	DBH Pusat
11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	Rp.	161.500.000	DBH Pusat
12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan	Rp.	166.500.000	DBH Pusat
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	Rp.	165.100.000	DBH Pusat
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang – Gareng Taji	Rp.	164.500.000	DBH Pusat
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	Rp.	179.400.000	DBH Pusat
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	Rp.	173.000.000	DBH Pusat
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	Rp.	160.000.000	DBH Pusat
18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	Rp.	148.800.000	DBH Pusat

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	Rp.	138.700.000	DBH Pusat
20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	Rp.	179.000.000	DBH Pusat
21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	Rp.	169.500.000	DBH Pusat
22	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	Rp.	144.000.000	DBH Pusat
23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	Rp.	600.000.000	DAK Non Fisik
24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	Rp.	845.000.000	DAK Non Fisik
25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	Rp.	875.000.000	DAK Non Fisik
26	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	Rp.	520.000.000	DAK Non Fisik
27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	Rp.	540.000.000	DAK Non Fisik
28	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	Rp.	390.000.000	DAK Non Fisik
29	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	Rp.	525.000.000	DAK Non Fisik
30	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	Rp.	650.000.000	DAK Non Fisik
31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	Rp.	470.000.000	DAK Non Fisik
32	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	Rp.	383.543.000	DAK Non Fisik
33	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan	Rp.	640.000.000	DAK Non Fisik
34	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran	Rp.	650.000.000	DAK Non Fisik
35	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang – Gareng Taji	Rp.	500.000.000	DAK Non Fisik
36	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	Rp.	775.000.000	DAK Non Fisik

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
37	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	Rp.	475.000.000	DAK Non Fisik
38	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	Rp.	385.000.000	DAK Non Fisik
39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	Rp.	400.000.000	DAK Non Fisik
40	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	Rp.	500.000.000	DAK Non Fisik
41	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	Rp.	545.000.000	DAK Non Fisik
42	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	Rp.	525.000.000	DAK Non Fisik
43	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	Rp.	630.000.000	DAK Non Fisik
44	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	Rp.	425.000.000	DAK Non Fisik
45	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	Rp.	1.158.060.000	PAD
46	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	Rp.	838.662.000	PAD
47	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan	Rp.	1.174.593.000	PAD
48	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	Rp.	535.484.000	PAD
49	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol	Rp.	1.097.685.000	PAD
50	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	Rp.	1.826.738.000	PAD
51	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	Rp.	785.530.000	PAD
52	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	Rp.	1.272.195.000	PAD
53	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	Rp.	1.074.122.000	PAD
54	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Rp.	710.843.000	PAD

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
55	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	Rp	1.540.087.000	PAD
56	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	Rp	1.123.968.000	PAD
57	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung	Rp	480.025.000	PAD
58	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	Rp	755.007.000	PAD
59	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo	Rp	923.715.000	PAD
60	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	Rp	1.398.193.000	PAD
61	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro	Rp	1.073.743.000	PAD
62	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo	Rp	431.350.000	PAD
<b>14</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>13.872.812.000</b>	
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	125.000.000	DBH Pusat
2	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Rp.	3.000.000.000	DAU
3	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	Rp.	125.000.000	DBH Provinsi
4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	Rp.	120.000.000	DBH Provinsi
5	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)	Rp	3.375.000.000	PAD
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	893.000.000	PAD
7	Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	Rp	1.007.000.000	PAD
8	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Rp	140.000.000	DBH Pusat
9	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	Rp	175.000.000	DBH Pusat
10	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Rp	95.000.000	DBH Pusat
11	Pengelolaan Obat E-Logistik	Rp	98.834.000	DAK Non Fisik
12	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Rp	716.400.000	DAK
13	Pengadaan Alat Kesehatan (BU dan Pendamping DAK)	Rp	25.000.000	DBH Pusat

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
14	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Rp	3.785.802.000	DAK
15	Pengawasan Pangan (DAK Non-Fisik)	Rp	191.776.000	DAK Non Fisik

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Persentase Keluarga Sehat	0,22 %
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Indeks

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 927.470.000</b>	
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 766.000.000	DBH Pusat
2 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp. 100.000.000	DBH Pusat
3 Survey Kepuasan Masyarakat	Rp. 61.470.000	DBH Pusat
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 272.000.000</b>	
1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 172.000.000	DBH Pusat
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp. 35.000.000	DBH Pusat
3 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp. 40.000.000	DBH Pusat
4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 25.000.000	DBH Pusat
<b>3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp -</b>	
1 Pendidikan dan Pelatihan formal	Rp. -	DBH Pusat
2 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan	Rp. -	DBH Pusat
<b>4 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 118.671.000</b>	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 74.600.000	DBH Pusat
2 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	Rp. 44.071.000	DBH Pusat

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>5</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Rp</b>	<b>14.434.218.900</b>	
	1 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Rp.	150.000.000	DID
	2 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Rp.	225.000.000	DID
	3 Jaminan Persalinan	Rp	1.999.629.000	DAK Non Fisik
	4 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp	6.682.474.000	DAK Non Fisik dan Dana Cadangan
	5 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp.	225.000.000	DID
	6 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp.	900.000.000	DID
	7 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Rp.	600.000.000	DID
	8 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan	Rp.	300.000.000	DID
	9 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	Rp.	200.000.000	DID
	10 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.	43.593.750	DBH Pusat
	11 Pengembangan Taman Posyandu	Rp.	125.000.000	BKK Provinsi Jatim
	12 Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Rp.	603.327.000	DAU
	13 Pengembangan Poskestren	Rp	121.029.000	BKK Provinsi Jatim
	14 Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	Rp.	1.933.625.000	DAK
	15 Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (BU dan Pendamping DAK)	Rp.	30.646.150	DAU
	14 Biaya Umum Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Rp.	294.895.000	DBH Pusat
<b>6</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>5.367.711.000</b>	
	1 Pelayanan Kesehatan Primer	Rp.	192.211.150	DBH Pusat
	2 Akreditasi Puskesmas	Rp.	28.112.000	DBH Pusat
	3 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Rp.	914.564.000	DAK Non Fisik

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
4	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	50.000.000	DBH Pusat
5	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Rp.	37.502.700	DBH Pusat
6	Pengamanan Kesehatan (PAM)	Rp.	275.000.000	DBH Pusat
7	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Rp.	3.245.321.150	DBH Pusat dan BKK Prov Jatim
8	Pelayanan Public Safety Center (PSC)	Rp.	500.000.000	DBH Pusat
9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Rp.	125.000.000	DBH Pusat
<b>7</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	<b>Rp</b>	<b>4.051.041.188</b>	
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Rp.	828.350	DAU
2	Pengadaan Puskesmas Keliling	Rp.	1.600.000.000	DAU
3	Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas pembantu	Rp.	250.000.000	DAU
4	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK)	Rp.	1.838.890.838	DAK Fisik
5	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	Rp.	-	DAU
6	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK)	Rp.	353.322.000	DAK Fisik
7	Pengadaan Puskesmas Keliling (BU dan Pendamping DAK)	Rp.	8.000.000	DAU
<b>8</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	<b>Rp</b>	<b>3.217.350.000</b>	
1	Pembangunan Rumah Sakit	Rp.	1.000.000.000	DAU
2	Pengembangan Ruang Operasi	Rp	2.200.000.000	DID Tambahan
3	Biaya Pendamping Pengembangan Ruang Operasi DID-T	Rp	17.350.000	DAU
<b>9</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>17.000.000.000</b>	
1	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	Rp	5.000.000.000	DID dan DAU

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
2	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Rp	12.000.000.000	DBH Pajak Rokok
<b>10</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>14.656.772.703</b>	
1	Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Rp.	-	DBHCHT
2	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan / penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan / gedung/ ruang pelayanan kesehatan di FKTP	Rp	1.897.787.401	DBHCHT
3	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan / penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan / gedung/ ruang pelayanan kesehatan di FKTL	Rp.	2.000.000.000	DBHCHT
4	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP	Rp.	2.980.000.000	DBHCHT
5	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP	Rp.	7.778.985.302	DBHCHT

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
	6 Kegiatan pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Rp	-	DBHCHT
<b>11</b>	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	<b>Rp</b>	<b>2.488.887.460</b>	
	1 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Rp.	961.377.760	DID
	2 Peningkatan Imunisasi	Rp.	205.000.000	DID
	3 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Rp.	246.947.100	DID
	4 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Rp.	940.562.600	DID
	5 Pelayanan Kesehatan Matra	Rp.	60.000.000	DID
	6 Peningkatan Peran KPAD	Rp.	75.000.000	DID
<b>12</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Perorangan</b>	<b>Rp</b>	<b>90.000.000.000</b>	
	1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)	Rp	101.158.320.993	PAD
<b>13</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>47.387.914.152</b>	
	1 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Rp	1.600.681.803	PAD
	2 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)	Rp	3.317.505.211	PAD
	3 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)	Rp	1.921.525.137	PAD
	4 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	Rp	1.774.381.579	PAD
	5 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	Rp.	162.000.000	DBH Pusat
	6 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	Rp.	144.000.000	DBH Pusat
	7 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	Rp.	172.500.000	DBH Pusat
	8 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	Rp.	137.000.000	DBH Pusat
	9 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	Rp.	147.000.000	DBH Pusat

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	Rp.	173.500.000	DBH Pusat
11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	Rp.	161.500.000	DBH Pusat
12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembayan	Rp.	166.500.000	DBH Pusat
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	Rp.	165.100.000	DBH Pusat
14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang – Gareng Taji	Rp.	164.500.000	DBH Pusat
15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	Rp.	179.400.000	DBH Pusat
16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	Rp.	173.000.000	DBH Pusat
17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	Rp.	160.000.000	DBH Pusat
18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	Rp.	148.800.000	DBH Pusat
19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	Rp.	138.700.000	DBH Pusat
20	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	Rp.	179.000.000	DBH Pusat
21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	Rp.	169.500.000	DBH Pusat
22	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	Rp.	144.000.000	DBH Pusat
23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	Rp.	600.000.000	DAK Non Fisik
24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	Rp.	845.000.000	DAK Non Fisik
25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	Rp.	875.000.000	DAK Non Fisik
26	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	Rp.	520.000.000	DAK Non Fisik
27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	Rp.	540.000.000	DAK Non Fisik

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
28	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	Rp.	390.000.000	DAK Non Fisik
29	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	Rp.	525.000.000	DAK Non Fisik
30	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	Rp.	650.000.000	DAK Non Fisik
31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	Rp.	470.000.000	DAK Non Fisik
32	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	Rp.	383.543.000	DAK Non Fisik
33	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan	Rp.	640.000.000	DAK Non Fisik
34	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran	Rp.	650.000.000	DAK Non Fisik
35	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang – Gareng Taji	Rp.	500.000.000	DAK Non Fisik
36	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	Rp.	775.000.000	DAK Non Fisik
37	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	Rp.	475.000.000	DAK Non Fisik
38	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	Rp.	385.000.000	DAK Non Fisik
39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	Rp.	400.000.000	DAK Non Fisik
40	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	Rp.	500.000.000	DAK Non Fisik
41	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	Rp.	545.000.000	DAK Non Fisik
42	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	Rp.	525.000.000	DAK Non Fisik
43	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	Rp.	630.000.000	DAK Non Fisik
44	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	Rp.	425.000.000	DAK Non Fisik
45	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	Rp.	1.431.284.128	PAD

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
46	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	Rp	1.117.792.031	PAD
47	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan	Rp	1.529.482.357	PAD
48	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung	Rp	547.583.495	PAD
49	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol	Rp	1.371.903.303	PAD
50	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	Rp	2.514.921.742	PAD
51	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	Rp	1.240.896.052	PAD
52	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	Rp	1.965.075.951	PAD
53	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	Rp	1.627.145.478	PAD
54	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Rp	776.434.462	PAD
55	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	Rp	1.976.622.424	PAD
56	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	Rp	1.278.676.040	PAD
57	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung	Rp	576.280.103	PAD
58	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	Rp	1.005.970.674	PAD
59	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo	Rp	1.313.268.739	PAD
60	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	Rp	1.602.084.039	PAD
61	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro	Rp	1.214.931.639	PAD
62	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo	Rp	548.925.065	PAD

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>14</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.155.279.050</b>	
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	68.790.950	DAU
2	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Rp.	3.000.000.000	DID
3	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	Rp.	60.000.000	DBH Provinsi
4	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	Rp.	120.000.000	DBH Provinsi
5	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)	Rp.	3.737.142.000	PAD
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.071.940.000	PAD
7	Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	Rp.	1.207.080.000	PAD
8	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Rp.	61.852.100	DBH Pusat
9	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	Rp.	-	DBH Pusat
10	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Rp.	10.662.000	DBH Pusat
11	Pengelolaan Obat E-Logistik	Rp.	98.834.000	DAK Non Fisik
12	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Rp.	716.400.000	DAK
13	Pengadaan Alat Kesehatan (BU dan Pendamping DAK)	Rp.	25.000.000	DAU
14	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Rp.	3.785.802.000	DAK
15	Pengawasan Pangan (DAK Non-Fisik)	Rp.	191.776.000	DAK Non Fisik

**LAMPIRAN III**  
**PENGUKURAN**  
**KINERJA 2020**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
					2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	a. Persentase Keluarga Sehat	0,22 %	0,21 %	0,23 %	100 %
			b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	77 indeks	86,45 %	90,39%	100 %